



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



**POLITIK ELITE NU; KEBERPIHAKAN DALAM PILPRES
TAHUN 2019**

SKRIPSI

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mengikuti Ujian Oral
Comprehensive Strata 1 Pada Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial
Universitas Islam Negeri Sultan syarif Kasim Riau

OLEH :

APRIYAWAN
NIM. 11675102528



UIN SUSKA RIAU

PROGRAM S.1
JURUSAN ADMINISTRASI NEGARA
FAKULTAS EKONOMI DAN ILMU SOSIAL
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM
RIAU PEKANBARU
2020



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

LEMBAR PERSETUJUAN

NAMA : APRIAWAN
 NIM : 11675102528
 FAKULTAS/JURUSAN : Ekonomi dan Ilmu Sosial / Ilmu Administrasi Negara
 JUDUL SKRIPSI : POLITIK ELIT NU; KEBERPIHAKAN DALAM
 PILPRES TAHUN 2019

**DISETUJUI OLEH
 DOSEN PEMBIMBING**

Mashuri, MA
 NIP. 19770721 201411 1 002

MENGETAHUI

**DEKAN FAKULTAS
 Ekonomi dan Ilmu Sosial**

**KETUA JURUSAN
 Ilmu Administrasi Negara**



Dr. Drs. H. Muh. Said HM, M.Ag, MM
 NIP. 19620512-198903 1 003

Dr. Kamaruddin, S.Sos, M.Si
 NIP. 19790101 200710 1 003

UIN SUSKA RIAU



LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI

: APRIYAWAN

: 11675102528

: Ekonomi dan Ilmu Sosial/Ilmu Administrasi Negara

: POLITIK ELITE NU; KEBERPIHAKAN DALAM PILPRES
TAHUN 2019

: SELASA, 16 JUNI 2020

PANITIA PENGUJI
KETUA PENGUJI

Fakhurrozi, SE, M.M
NIP. 19670725 200003 1 002

PENGUJI II

Candra Jon Asmara, S.Sos., M.Si
NIK. 130712074

PENGUJI I

Afrizal, S.Sos., M.Si
NIP. 19670419 200701 1 025

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim II

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarangi mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ABSTRAK

POLITIK ELITE NU; KEBERPIHAKAN DALAM PILPRES TAHUN 2019

Oleh :

Apriyawan
11675102528

Penelitian ini dilakukan di PWNU Riau. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui Bagaimanakah Keberpihakan Elite PWNU Riau dalam Pilpres Tahun 2019. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh adanya keterlibatan para elite-elite NU Riau dalam pilpres tahun 2019. Padahal NU dalam keputusannya yang menyandarkan basis kekuatannya pada pesantren ini menyatakan kembali ke Khittah 1926. Bahwa ia sekali lagi menyatakan secara tegas tidak mempunyai ikatan politik dengan orsospol (organisasi sosial politik) manapun. Penulis melakukan penelitian ini guna untuk mengetahui bagaimanakah keberpihakan Elite PWNU Riau dalam Pilpres Tahun 2019. Sumber penelitian ini penulis menggunakan data primer dan data sekunder untuk memperoleh data. Adapun teknik pengumpulan data dalam skripsi ini penulis menggunakan teknik wawancara, studi pustaka, dan dokumentasi. Dalam teknik pengambilan data ini penulis menggunakan purposive sampling yang bertujuan untuk dijadikan key informan yang terdiri dari 5 orang yaitu Rais Syuriah PWNU Riau, Sekretaris LPNU Riau. Akademisi, Tokoh NU, dan Simpatisan NU. Berdasarkan dari hasil penelitian yang telah dilakukan dilapangan dari berbagai sumber data dari hasil wawancara, studi pustaka, dan dokumentasi dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa semenjak NU di bawah kepemimpinan Said Aqil Siradj dan Rusli Ahmad NU kiblatnya lebih banyak kearah politik ketimbang kearah dalam membina umat, dan semenjak dibawah kepemimpinannya pula keberpihakan elite NU di pilpres tahun 2019 terhadap salah satu paslon terjadi. Semua itu disebabkan terdapat adanya kepentingan-kepentingan elitnya.

Kata Kunci : Politik, Elite NU, Keberpihakan, Pilpres 2019

UIN SUSKA RIAU



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

KATA PENGANTAR



Alhamdulillah, Puji syukur kami ucapkan kehadiran Allah SWT, yang telah memberikan rahmat dan atas berkat limpahannya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Shalawat dan Salam kepada Baginda Rasulullah SAW. Shalawat dan Salam semoga selalu tercurahkan kepada keluarga, teman-teman, sahabat dan seluruh umat manusia yang senantiasa istiqamah di jalannya.

Dalam kesempatan ini, terwujudlah bagi penulis sebuah Karya Ilmiah atau Skripsi ini bertujuan untuk melengkapi syarat memperoleh gelar Sarjana Sosial (S1) pada Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau dengan judul **“Politik Elite NU; Keberpihakan Dalam Pilpres Taun 2019”**.

Penulis menyadari bahwa keberhasilan penyusunan skripsi ini tidak terlepas dari bantuan berbagai pihak baik secara langsung maupun tidak langsung. Uraian terima kasih penulis kepada Allah SWT karena dengan ridhanya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini walaupun tidak ada kesempurnaan penulis dalam penulisan skripsi ini. Selanjutnya saya ucapkan terimakasih kepada:

Kedua Orang Tua Tercinta Ayahanda Alun dan Ibunda Hasrah dengan dorongan atas segala jasa yang tak pernah lelah mendidik penulis dan tak pernah lupa selalu berdoa serta dukungan untuk penulis sehingga penulis bisa menyelesaikan Karya Ilmiah atau Skripsi ini.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta ini milik UIN Suska Riau. State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Bapak Prof. Dr. H. Akhmad Mujahidin, S.Ag., M.Ag selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Bapak Dr. Drs.H. Muh. Said HM., M.Ag., MM selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Bapak Dr. Kamaruddin. S.sos, M.Si selaku Ketua Jurusan Administrasi Negara Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Ibu Weni Puji Hastuti, S.sos, M.KP selaku Sektetaris Jurusan.

6. Bapak Mashuri, MA selaku sebagai Dosen Pembimbing penulis yang telah memberikan arahan dan petunjuk dalam penyelesaian Karya Ilmiah atau Skripsi ini.

7. Bapak dan Ibu Dosen dan seluruh Civitas Akademika Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

8. Terima kasih kepada Abang dan Kakak kandungku Rahim, Bahtiar, Eva Royani, Yusma Lina, Eni Suryani dikampung Lahang Baru, Indragiri Hilir yang telah mendoakan penulis sehingga cepat selesai perkuliahan ini.

Terima kasih kepada seluruh teman-teman kuliah yang seiring berjuang bersama-sama dengan satu tujuan yang sama yaitu wisuda terutama teman satu kelas dan terkhususnya teman-teman yang sudah dekat di kelas yang selalu sering diajak bergurau dan canda tawa Dio, Rama, Zikri, Fauzan, Does, Rafles, Dedek, Fadli, Agus dan tidak bisa disebutkan satu persatu yang telah memberikan dukungan dan memberikan pemasukan motivasi positif kepada penulis tiada henti sehingga penulis bisa menyelesaikan



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

penulisan Karya Ilmiah atau Skripsi ini. Akhirnya penulis berharap semoga karya ilmiah ini bermanfaat bagi semua pihak yang memerlukan dimasa yang akan datang. Semoga apa yang kita lakukan menjadi imbalan dari Allah SWT. Amin ya robbal Alamin.

Pekanbaru, 07 April 2020

Penulis,

APRIYAWAN
NIM. 11675102528

UIN SUSKA RIAU



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI.....	v
BAB I PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Batasan Masalah	4
1.3 Rumusan Masalah	5
1.4 Tujuan dan Kegunaan Penelitian	5
1.4.1 Tujuan	5
1.4.2 Kegunaan Penelitian	5
1.5 Sistematika Penulisan	6
BAB II LANDASAN TEORI	
2.1 Politik	7
2.2 Politik Dalam Perspektif Islam	10
2.3. Etika Politik	13
2.4 Teori Elite dan Studi Elite di Indonesia.....	16
2.5 Konsep Elite Dalam Islam	19
2.6 Sikap Politik Elite Islam	22
2.7 Faktor-Faktor yang Mempengaruhi.....	25
2.8 NU dan Politik.....	27
2.9 Administrasi Kepemiluan.....	28
2.10 Pemilihan Presiden (Pilpres)	44
2.11 Kerangka Berpikir	47
2.12 Penelitian Terdahulu	47
2.13 Defenisi Konsep	55
2.14 Indikator Penelitian	56



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB III METODE PENELITIAN

3.1 Lokasi dan Waktu Penelitian	57
3.1.1 Lokasi	57
3.2.2 Waktu	57
3.2 Jenis Penelitian	58
3.3 Jenis Pengumpulan Sumber Data	58
3.3.1 Data Primer	58
3.3.2 Data Sekunder	59
3.4 Teknik Pengumpulan Data	59
3.5 Teknik Analisis Data	61
3.6 Informan Penelitian	62

BAB IV GAMBARAN UMUM OBJEK PENELITIAN

4.1 Sejarah Lahirnya Nahdlatul Ulama	63
4.2 Sejarah Lahirnya PWNU Riau	73

BAB V HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

5.1 Hasil Penelitian	76
5.2 Data Informan	77
5.3.3 Politik Elite NU; Keberpihakan Dalam Pilpres Tahun 2019	78
5.3 Motif	78
5.3.1 Pragmatis	79
5.3.2 Akomodatif	85
5.3.3 Kritis	88
5.4 Tindakan	92
5.4.1 Rekomendasi Penentuan Calon	92
5.4.2 Kampanye	96
5.5.3 Mobilisasi Massa	100



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

5.5 Responden 104

5.6. Pembahasan 106

BAB VI PENUTUP

6.1 Kesimpulan 109

6.2 Saran 110

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN



UIN SUSKA RIAU



BAB I PENDAHULUAN

1. Latar Belakang Masalah

Nahdlatul Ulama didirikan oleh K.H. Hasyim Asy'ari dan ulama terkemuka lainnya di Surabaya pada tanggal 16 Rajab 1344 H bertepatan dengan tanggal 31 Januari 1926. Dewasa ini posisi para kiai dan peranan kaum ulama dalam kancah gelanggang panjang pergerakan NU adalah sangat dominan dan menentukan. Dengan kata lain, para kiai dan ulama berfungsi dan berperan sebagai inspirator, motivator, stabilisator dan dinamisator seluruh aktivis dan sepak terjang pergerakan NU.

Itulah sebabnya, keberadaan warga Nahdlatul Ulama di Provinsi Riau tentunya mempengaruhi peta dukungan politik di pilpres tahun 2019. Apalagi ada 2.5 juta warga Nahdliyin yang siap memenangkan salah satu pasangan calon yang berkontestasi di pilpres tahun 2019 ini. Di situlah letak problem NU di pertaruhkan dan menjadi sebuah pilihan dan dianggap cara berkhidmat kepada bangsa dan negara.

Padahal sejak kembali ke *Khittah* 1926 sebagai hasil keputusan Mukhtamar Subondo tahun 1984, NU telah menyatakan tidak lagi berkecimpung dalam arena dan ajang politik mana pun. *Khittah* merupakan ruh, jiwa, semangat dan garis perjuangan yang menetapkan konsistensi dan indenpendensi NU sebagai sosok organisasi keagamaan dan sosial kemasyarakatan (*jam'iyah diniyah ijtima'iyah*).



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Penegasan kembali ke *Khittah 1926* bukanlah merupakan perlarian NU dari politik, apalagi untuk menutupi ambisi kekuasaan, tapi untuk membingkai pengabdian NU ke depan agar tidak ternodai oleh kepentingan politik praktis yang justru mengeruhkan ruh organisasi. Namun sayang, keputusan itu sangat tidak memiliki pengaruh apapun di alam pikiran kalangan elite-elite NU-nya.

Ternyata tidaklah gampang bagi NU untuk meluruskan garis perjuangan lurus tersebut. Terlebih ketika pemimpin dan orang-orang NU acapkali tergoda dan larut dalam permainan politik praktis yang berorientasi kekuasaan dan sarat kepentingan sesaat. Hal ini bisa dilihat pada saat PWNU Riau di bawah kepemimpinan Rusli Ahmad. Bahkan, Rusli Ahmad sendiri terlibat sangat jauh dengan menjadi salah satu pendukung pasangan calon presiden dan wakil presiden tahun 2019. Pun banyak elite-elite NU lainnya yang sudah terlalu jauh juga turut andil dalam kontestasi politik 2019 ini.

Ini merupakan suatu fenomena yang menarik untuk penulis teliti karena dari berbagai gejala yang tampak di dalam kontestasi pilpres tahun 2019 ini memiliki dampak yang begitu radikal bagi warga Nahdhiyin di Provinsi Riau, mulai dari perpecahan elite-elitenya sampai kepada perpecahan di akar rumputnya. Apalagi isu keagamaan hari-hari ini merupakan fenomena yang sangat menarik yang digunakan dalam sosial politik, tokoh agama dan ulama dijadikan *vote-getter* disetiap kali momen pemilu, menunjukkan betapa besarnya potensi politik figur atau aktor sosial keagamaan.

Bahkan seringkali naluri politik yang ditampilkan oleh para tokoh NU Riau menyeret NU secara kelembagaan ke pusaran utama politik praktis. Seperti



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

yang dilakukan Ketua PWNU Riau (Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama Riau) Rosli Ahmad. Diilansir oleh tribunpekanbaru.com (10/2/2019). Bahwa Warga NU satu suara dukung Jokowi-Ma'ruf Amin.

Ucapan itu tentu semata-mata tidak keluar begitu saja tanpa ada yang melatarbelakanginya. Karena tarikan-tarikan politik terhadap NU di Provinsi Riau ini sudah dapat dibaca sejak awal ketika kata dukungan itu belum terucap yaitu ini menarik warga NU Riau untuk memilih salah satu paslon untuk kepentingan politiknya atau untuk kepentingan-kepentingan politik tokoh-tokoh NU secara individual aktif di salah satu orsospol (organisasi sosial politik).

Apalagi jumlah massa NU Riau memiliki jumlah yang sangat besar tentu sangat menggiurkan para politisi. Oleh sebab itu NU dalam keputusannya yang menyandarkan basis kekuatannya pada pesantren ini menyatakan kembali ke *Khittah 1926*. Bahwa ia sekali lagi menyatakan secara tegas tidak mempunyai ikatan politik dengan orsospol (organisasi sosial politik) manapun. Bahwa NU kembali ke pautan semula dan menjadi organisasi yang membatasi gelanggang aktivitas dan gerakannya hanya dalam bidang sosial keagamaan dan meninggalkan arena percaturan dan pertarungan politik praktis.

Keterlibatan para tokoh-tokoh NU Riau dalam pilpres tahun 2019 merupakan bukti bahwa peran politik kaum Nahdiyyin di Negeri Lancang Kuning ini masih aktual dan berada pada posisi sentral. Namun seringkali juga terjadi perbedaan pendapat yang timbul baik dari diri elite NU itu sendiri maupun dari masyarakat kalangan bawah.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Diarangi mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Berdasarkan uraian di atas, dampak yang akan terjadi akibat dari keberpihakan elite NU pada proses pemilihan presiden dan wakil presiden akan mempengaruhi suara dan terpecahnya warga Nahdhiyin dalam menyikapi pilpres tahun 2019. Hal ini tentu memiliki implikasi baik dari segi positif maupun negatif. Karena disadari atau tidak, keberpihakan elite NU dalam pilpres tahun 2019 ini membawa implikasi pada bersilangnya pendapat antar tokoh NU dan sudah barang tentu pasti merambah pada yang menyedihkannya yakni perpecahan dikalangan tokoh NU, ulama yang merupakan representasi dari NU, warga Nahdhiyin, dan sampai ke akar rumput sehingga perpecahan itu meninggalkan sisa-sisa yang berdampak pada yang lebih menyedihkan lagi.

Lantas pertanyaan yang timbul adalah bagaimanakah keberpihakan politik oleh elite NU dalam pemilihan presiden tahun 2019. Maka penulis mengangkat berbagai permasalahan yang timbul di atas menjadi sebuah karya ilmiah atau skripsi dengan judul **“POLITIK ELITE NU; KEBERPIHAKAN DALAM PILPRES TAHUN 2019”**.

1. Batasan Masalah

Pembatasan suatu wilayah digunakan untuk menghindari adanya penyimpangan maupun pelebaran pokok masalah agar penelitian tersebut lebih terarah dan memudahkan dalam pembahasan sehingga tujuan penelitian akan tercapai. Oleh karena itu penulis membatasi masalah penelitian **“Politik Elite NU; Keberpihakan Dalam Pilpres Tahun 2019”**. Masalah penelitian ini di NU maupun



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

organisasi yang ada di wilayah Indonesia, karena keterbatasan penulis, maka penulis meneliti elite NU di PWNU Riau.

1.3. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian pada latar belakang di atas, maka rumusan masalah yang ingin dibahas oleh penulis ialah:

Bagaimanakah keberpihakan Elite PWNU Riau dalam Pemilihan Presiden tahun 2019?

1.4. Tujuan dan Kegunaan penelitian

1.4.1. Tujuan Penelitian

Agar penulisan dapat memperoleh suatu sasaran yang jelas dan tepat sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai, maka tujuan penulisan adalah sebagai berikut :

Untuk mengetahui bagaimanakah keberpihakan Elite PWNU Riau dalam pemilihan presiden tahun 2019.

1.4.2. Kegunaan Penelitian

Sebagai tambahan ilmu pengetahuan bagi penulis maupun pihak lain mengenai kajian terhadap Politik Elite NU; Keberpihakan Dalam Pilpres Tahun 2019.

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Diarar mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarar mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

5. Sistematika Penulisan

Penelitian ini berisikan bab demi bab dalam laporan penelitian yang berisikan :

BAB I : PENDAHULUAN

Pada bab ini berisi mengenai latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian dan manfaat penelitian.

BAB II : LANDASAN TEORI

Pada bab ini mengenai teori-teori yang berkaitan dengan, politik, politik islam, etika politik, teori elit, NU dan elit politik, pilpres.

BAB III : METODE PENELITIAN

Pada bab ini berisi bentuk penelitian, sumber data, tehknik pengumpulan data, dan analisis data.

BAB IV : GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

Yaitu menjelaskan tentang gambaran umum obyek penelitian.

BAB V : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini menjelaskan hasil dari penelitian beserta pembahasannya

BAB VI : PENUTUP

Bab ini penulis memberikan kesimpulan dan saran dari hasil penelitian

UIN SUSKA RIAU



2. Politik

Asal mula kata Politik berasal dari kata *polis* yang berarti negara atau kota, dengan politik artinya ada hubungan khusus antara manusia yang hidup bersama, dalam hubungan ini timbul aturan, kewenangan, perilaku pejabat, legalitas kekuasaan (Syafiie 2010: 11). Pada umumnya dapat dikatakan bahwa politik (*politics*) adalah usaha untuk menentukan peraturan-peraturan yang dapat diterima baik oleh sebagian warga, untuk membawa masyarakat ke arah kehidupan bersama yang harmonis (Budiardjo, 2012: 15).

Politik adalah kegiatan yang menyangkut cara bagaimana kelompok-kelompok mencapai keputusan-keputusan yang bersifat kolektif dan mengikat melalui usaha mendamaikan perbedaan-perbedaan di antara anggota-anggotanya. Politik adalah kegiatan suatu bangsa yang bertujuan untuk membuat, mempertahankan, dan mengamandemenkan peraturan-peraturan umum yang mengatur kehidupannya, yang berarti tidak dapat terlepas dari gejala konflik dan kerjasama (Heywood dalam Budiardjo, 2012: 16).

Ossip K. Fletcteim dalam *Fundamenatal Of Political Science* menegaskan bahwa ilmu politik adalah ilmu sosial yang khusus mempelajari sifat dan tujuan dari negara sejauh negara merupakan organisasi kekuasaan, beserta sifat dan tujuan dari gejala-gejala kekuasaan lain yang tidak resmi yang dapat mempengaruhi negara. Menurut Robbert A. Dahl ilmu politik, untuk selanjutnya akan dianggap pelajaran tentang negara, maksud dari tujuan negara, lembaga



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

yang melaksanakan tujuan tersebut, hubungan antar negara dengan warga negaranya, serta hubungan antar negara, dan juga apa yang dipikirkan warganya (Syafii 2010: 10).

Defenisi politik juga diberikan oleh seorang ilmuwan politik terkemuka lainnya, salah satunya Andrew Heywood. Menurut Andrew Heywood, politik adalah suatu kegiatan suatu bangsa yang bertujuan untuk membuat, mempertahankan, dan mengamandemenkan peraturan-peraturan yang mengatur kehidupannya, yang berarti tidak dapat terlepas dari gejala konflik dan kerja sama (A. Gabriel, 2007: 3).

Menurut Ramlan Subakti (1991: 1) politik adalah interaksi antara pemerintah dan masyarakat dalam rangka proses pembuatan dan pelaksanaan keputusan yang mengikat tentang kebaikan bersama masyarakat yang tinggal dalam suatu wilayah tertentu.

Menurut F. Isjwara, (1995 : 42) politik ialah salah satu perjuangan untuk memperoleh kekuasaan atau sebagai teknik menjalankan kekuasaan-kekuasaan. Sedangkan menurut Kartini Kartono (1996: 64) bahwa politik dapat diartikan sebagai aktivitas perilaku atau proses yang menggunakan kekuasaan untuk menegakan peraturan-peraturan dan keputusan-keputusan yang sah berlaku di tengah masyarakat.

David Easton seperti dikutip oleh Miriam Budiarjo (2008: 13) mengemukakan bahwa "Politik adalah kehidupan politik yang mencakup bermacam-macam kegiatan yang mempengaruhi kebijaksanaan dari pihak yang



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

berwenang yang diterima oleh suatu masyarakat dan yang mempengaruhi cara untuk melaksanakan itu”.

Roger Henry Soltau (1951: 12) dalam bukunya *Inroduction to Politics* menegaskan bahwa Ilmu politik mempelajari negara, tujuan-tujuan dan lembaga-lembaga yang akan melaksanakan tujuan itu; hubungan antara negara dengan warganegaranya serta dengan negara-negara lain.

J. Barent (1965:45) mengemukakan dalam bukunya *Ilmu Politika* ilmu politik adalah ilmu yang mempelajari kehidupan negara yang merupakan bagaian dari kehidupan masyarakat, ilmu politik mempelajari negara-negara itu dalam melaksanakan tugas-tugasnya.

William A. Robson (1954:98) dalam bukunya *The University Teaching of Social Sciences* menerangkan bahwa ilmu politik mempelajari kekuasaan dalam masyarakat, aitu sifat hakiki, dasar, proses-proses, ruang lingkup dan hasil-hasil. Focus perhatian seorang sarjana politik tertuju pada perjuangan untuk mencapai atau mempertahankan kekuasaan aau pengaruh atas orang lain, atau menentang pelaksanaan kekuasaan itu.

Deliar Noer (1965:23) dalam bukunya *Pengantar ke Pemikiran Politik* menegaskan bahwa ilmu politik memusatkan perhatian pada masalah kekuasaan dalam kehidupan bersama atau masyarakat. Kehidupan ini tidak terbatas pada bidang hukum semata-mata, dan tidak pula pada negara yang tumbuhnya dalam sejarah hidup manusia relatif baru. Di luar bidang hukum serta sebelum negara ada, masalah kekuasaan itu pun telah pula ada. Hanya pada zaman modern ini memanglah kekuasaan itu berhubungan erat dengan negara.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2.2 Politik dalam Perspektif Islam

Islam tidak memisahkan urusan agama dan politik. Justru, Islam memandang politik sebagai bagian dari jalur dakwah yang harus dimanfaatkan oleh umat Islam. Jika kita melihat sejarah, praktek politik di kalangan umat Muslim telah dilakukan sejak masa Nabi Muhammad SAW, terutama saat lahirnya Piagam Madinah dan juga masa setelah itu, yaitu masa Khalafaurrasyidin di awal-awal tahun hijriyah (Thaba, 1996: 83-111). Dinamika Islam dan politik di Indonesia telah di mulai sejak pra kemerdekaan, tetapi pasca kemerdekaan dimulai saat terjadi perdebatan tentang dasar negara.

Di satu sisi, kelompok nasionalis Islam memandang, bahwa Islam harus menjadi dasar negara yang kemudian tertuang dalam Piagam Jakarta. Di sisi lain, kelompok nasionalis sekuler memandang bahwa, Islam harus dipisahkan dari urusan kenegaraan alias menolak Islam menjadi dasar negara. Kemudian muncul gagasan Pancasila yang kemudian resmi menjadi dasar negara.

Setelah mengalami kegagalan, perdebatan tentang dasar negara muncul kembali setelah pemilu 1955 dengan dibentuknya Majelis Konstituante yang bertugas menyusun UUD yang permanen. Namun,, Majelis Konstituante menemui jalan buntu hingga tahun 1959 dan dipandang oleh Soekarno tidak dapat bekerja dengan baik. Akhirnya, dengan dekrit presiden, Majelis Konstituante dibubarkan dan UUD '45 kembali diberlakukan sebagai UUD permanen. Lagi-lagi gagasan Islam mengalami kegagalan.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Perjuangan politik melalui partai juga menjadi menarik untuk dikaji, melihat mayoritas penduduk Indonesia adalah umat Islam. Setelah gagasan negara Islam gagal, umat Islam sepakat mendirikan Masyumi. Namun perpecahan terjadi di tubuh Masyumi. NU memisahkan diri menjadi Partai NU dan Sarekat Islam mendirikan PSII. perjuangan politik Masyumi pun tidak selalu bernasib baik.

Di penghujung tahun 1959 bersamaan dengan dibubarkannya Majelis Konstituante, Masyumi pun dibubarkan oleh Soekarno karena dianggap terlibat dalam pemberontakan PRRI/Permesta. Proses rehabilitasi dilakukan di era Soeharto tetapi kembali ditolak. Sebagai jalan tengah, lahirlah partai baru bernama Parmusi. Namun, nasib tidak baik juga menimpa Parmusi yang harus mengalami fusi partai menjadi PPP. Dari tahun ke tahun, partai Islam selalu mengalami penurunan suara.

Selain itu, fenomena terorisme yang selalu dikaitkan dengan jihad dalam tradisi Islam tak kalah menarik untuk ditelaah. Kajian tentang terorisme menjadi semakin semarak setelah peristiwa 9/11 yang meledakan dua menara kembar milik negara adikuasa, AS. Pasca peledakan tersebut, sejumlah aksi terorisme mewarnai di berbagai daerah di tanah air.

Fakta menyebutkan, aktor dibalik setiap tersebut adalah aktivis dari kelompok Islam. Ada apa sebenarnya? Di sinilah pada akhirnya, terorisme tidak sekedar menjadi fenomena kejahatan semata, melainkan dapat menjadi alat politik untuk berbagai kepentingan, misal untuk mengalihkan isu, melemahkan



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pemerintah, dan lain sebagainya. “Islam” begitu seksi untuk ditarik pada wilayah politik.

Tetapi politik yang hanya dipahami sebagai perjuangan mencapai kekuasaan atau pemerintahan, hanya akan mengaburkan maknanya secara luas dan menutup kontribusi Islam terhadap politik secara umum. Sering dilupakan bahwa Islam dapat menjadi sumber inspirasi kultural dan politik. Pemahaman terhadap terminologi politik secara luas, akan memperjelas korelasinya dengan Islam.

Pada hakikatnya antara politik dan Islam tidak dapat dipisahkan, sehingga secara ringkas politik Islam/syari’ah dikatakan Abdul Qadir adalah politik yang membawa seluruh umat manusia kepada ketentuan-ketentuan Islam, (2003:16). Politik Islam merupakan aktivitas Politik sebagian umat Islam yang menjadikan Islam sebagai acuan nilai dan basis solidaritas berkolompok, Sebungan dengan hal ini sebagaimana dalam firman Allah S.W.T :

وَالَّذِينَ اسْتَجَابُوا لِرَبِّهِمْ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَمْرُهُمْ شُورَى بَيْنَهُمْ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنفِقُونَ (٣٨)

Artinya:

Dan (bagi) orang-orang yang menerima (mematuhi) seruan Tuhan dan melaksanakan salat, sedang urusan mereka (diputuskan) dengan musyawarah antara mereka; dan mereka menginfakkan sebagian dari rezeki yang Kami berikan kepada mereka. (Q.S. asy-Syura: 38)

Dari penjelasan ayat diatas bahwa Mereka tidak bertindak sendiri dan tergesa-gesa dalam masalah yang terkait orang banyak. Oleh karena itu, apabila mereka ingin melakukan suatu perkara yang butuh pemikiran dan ide, maka



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

mereka berkumpul dan mengkaji bersama-sama, sehingga ketika sudah jelas maslahatnya, maka mereka segera melakukannya. Apakah itu masalah perang dan jihad, mengangkat pemerintahan atau yang menjadi hakim, demikian pula membahas masalah-masalah agama secara umum, karena ia termasuk masalah yang terkait antara sesama, dan membahasnya agar jelas yang benar yang dicintai Allah.

Namun Pendukung perpolitikan ini belum tentu seluruh umat Islam, karena mereka dalam kategori politik dapat disebut sebagai kelompok Politik Islam, juga menekan simbolisme keagamaan dalam berpolitik, seperti menggunakan lambing Islam, dan istilah-istilah keislaman dalam peraturan dasar organisasi, *khittah* perjuangan, serta wacana Politik Model Islam Struktural bisa melalui Islam Politik (partai politik) atau juga tidak melalui partai (Nasiwan, 2003: 101).

2.3 Etika Politik

Kata etika secara etimologis berasal dari kata Yunani “ethos”, secara harfiah berarti adat kebiasaan, watak, atau kelakuan manusi. Etika merupakan suatu istilah yang cukup banyak dipakai dalam lingkup sehari-hari. Kata tersebut memiliki arti yang lebih luas dari sekedar etimologis-harfiah. Secara etimologis kata etika sebenarnya dengan kata moral. Kata moral berasal dari kata lain “ethos”-“moris” yang sama dengan kata etika dalam bahasa Yunani berarti adat kebiasaan. Perbedaan kedua istilah ini adalah, kata etika dipakai untuk menyebut ilmu dan prinsip-prinsip dasar penilaian baik buruknya perilaku manusia,



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

sedangkan moral dipakai untuk menyebut aturan atau norma yang lebih konkret bagi penilaian baik-buruknya perilaku manusia (J.Sudarminta, 2013: 1).

Kata etika dalam pemakaiannya sehari-hari dapat dibedakan menjadi tiga kata etika. *Pertama*, sebagai sebuah sistem nilai, maksudnya etika di sini berarti nilai-nilai dan norma-norma moral yang menjadi pasangan hidup atau sebagai pedoman penilaian baik buruknya perilaku manusia, baik secara individual, maupun sosial dalam suatu masyarakat. Arti pertama ini biasa dipakai dalam etika Jawa dan etika Protestan. *Kedua*, kode etik, maksudnya kumpulan norma kumpulan norma dan nilai moral yang wajib diperhatikan oleh pemegang profesi tertentu, seperti dalam pemakaian istilah etika kedokteran dan etika jurnalistik. *Ketiga*, Filsafat moral artinya ilmu yang melakukan refleksi kritis dan sistematis tentang moralitas (J.Sudarminta, 2013: 1-2).

Etika politik sangat penting diwujudkan, terutama menjelang adanya pemilu, karena etika politik tidak hanya terkait dengan masalah politikus, namun etika politik juga berhubungan dengan praktik institusi sosial, hukum, komunitas, struktur-struktur sosial, politik, dan ekonomi. Etika politik menjadi penting karena Hal tersebut akan mempengaruhi kebijakan-kebijakan yang ditentukan oleh pemerintah nantinya. Menurut Bernhard Sutor, *Politsche Ethik*, 1991. hlm. 80. Etika politik dibagi menjadi tiga dimensi: *pertama* tujuan politik, *kedua* menyangkut masalah sarana, *ketiga* berhadapan dengan aksi politik atau terkait langsung dengan perilaku politikus (Haryotmoko, 2014:33).

Pertama, dimensi tujuan dirumuskan dalam upaya mencapai kesejahteraan masyarakat dan hdiup damai yang didasarkan pada kebebasan dan



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

keadilan. Dimensi moralnya terletak pada kemampuan untuk menentukan arah yang jelas atas kebijakan umum dan akuntabilitas (Haryotmoko, 2014: 33-34).

Kedua, dimensi sarana yang memungkinkan pencapaian tujuan (polity). Dimensi ini meliputi sistem dan prinsip-prinsip dasar pengorganisasian praktik penyelenggaraan negara dan yang mendasari institusi-institusi sosial. Dimensi sarana (polity) mengandung dua pola normatif. *Pertama*, tatanan politik (hukum dan institusi) harus mengikuti prinsip solidaritas dan subsidiaritas, penerimaan pluralitas: struktur sosial ditata secara politik menurut prinsip keadilan. Maka asas kesamaan dan masalah siapa diuntungkan atau siapa yang dirugikan oleh hukum atau institusi tertentu relevan untuk dibahas. *Kedua*, kekuatan-kekuatan politik ditata sesuai dengan prinsip timbal balik. (Haryotmoko, 2014:34-35).

Ketiga, dimensi sosial tingkat sarana ini terletak pada peran etika dalam menguji dan mengkritisi legitimasi dalam keputusan-keputusan, institusi-institusi dan praktik-praktik politik. Dimensi yang ketiga adalah praktik politik (*politics*). Dalam dimensi etika ketiga ini pelaku memegang peran sebagai yang menentukan rasionalitas politik, rasionalitas politik terdiri dari rasionalitas tindakan dan keutamaan (kualitas moral perilaku), tindakan politik disebut rasional apabila perilaku mempunyai orientasi situasi dan paham permasalahan, pada dimensi aksi ini etika indentik dengan tindakan yang rasional dan bermakna. Politik mempunyai makna karena memperhitungkan yang lain: harapan, protes, kritik, persetujuan, atau penolakan (Haryotmoko, 2014:36-37).

Etika berkaitan erat dengan moralitas Individu. Etika bukan saja berkenaan dengan motif tetapi juga tindakan, karena dalam bidang etika



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

menyatakan bahwa motif yang tidak kurang pentingnya daripada tindakan berpengaruh pada karakter individu. Etika meliputi aturan-aturan yang menggambarkan kebaikan dan kebenaran hakiki, dengan mewujudkan cita-cita luhur jika aturan-aturan dilaksanakan oleh sukarela maka kehidupan tentu akan menjadi baik. Meskipun pada etika menyangkut urusan yang pribadi, tetapi hal tersebut mempengaruhi dan menyempurnakan kode etik masyarakat (Carlton Oymer Rodde, Carl Quimbby Christol, Totton James Anderson, Thomas H. Greene, 2008: 80).

Etika politik tercermin dari sikap dan perilaku politik bangsa sesuai kerangka aturan yang mengkristal dari logika-logika publik demi tercapainya tujuan berbangsa dan bernegara. Dimana dalam jangka panjang, etika dan logika politik akan mendorong percepatan realisasi agenda reformasi sekaligus mengakhiri transisi menuju konsolidasi demokrasi. (A. Bakir Ihsan, 2009: 7).

2.4 Teori Elite dan Studi Elite di Indonesia

Pembahasan tentang elite dalam landasan teori ini merujuk pada makna yang telah dikonsepsikan oleh Putnam, Pareto, dan Mosca. Menurut Putnam (2001: 80), elite merupakan sekelompok orang yang memiliki kekuasaan politik yang lebih dibandingkan dengan yang lain.

Fokus kajiannya adalah kekuasaan, yang terbagi ke dalam dua konsepsi. *Pertama*, kekuasaan sebagai kemampuan untuk mempengaruhi individu-individu lain. *Kedua*, kekuasaan sebagai kemampuan untuk mempengaruhi pembuat keputusan kolektif seperti undang-undang. Karena itu, Putnam membagi elite ke



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dalam dua kelompok, yakni mereka yang memiliki kekuasaan politik “penting”, dan mereka yang tidak memilikinya. Sedangkan berdasarkan konsepsi Mosca dan Putnam, elite dapat diklasifikasikan ke dalam dua kelompok sebagaimana yang diemukakan oleh Pareto dan dikutip ulang oleh Bottomore (2006: 2).

Pertama, elite yang memerintah (*governing elite*), terdiri dari individu-individu yang seara langsung atau tidak langsung memainkan peranan yang besar dalam pemerintahan. *Kedua*, elite yang tak memerintah (*non-governing elite*) yang mencakup sisanya.

Dari sini dapat dipahami, bahwa konsep elite setidaknya memenuhi kriteria sebagai berikut. *Pertama*, elite merupakan kelompok pilihan yang jumlahnya minoritas. *Kedua*, elite memiliki kekuasaan politik penuh. *Ketiga*, dapat mempengaruhi dan menentukan arah perubahan sosial dalam lingkup kekuasaannya. *Keempat*, elite adalah kelompok yang terorganisir dan terstruktur. *Kelima*, elite dapat melakukan perintah terhadap orang selain mereka atau massa yang tak terorganisir.

Dalam konteks Indonesia, Kartodirjo (1981: vii) memberi pemahaman tentang elite sebagai golongan sosial terkemuka yang memiliki kekuasaan dan memainkan peran penting dalam menentukan arah gerak perubahan sosial di Indonesia. Lebih lanjut, Baswedan (2006) menetapkan elite Indonesia berdasarkan kurun waktu tertentu. Berikut digambarkan dalam tabel.



Tabel 2.4 Formasi dan Sirkulasi *Rulling Elite* Indonesia Versi Anies Baswedan

FASE PEMBENTUKAN ELITE		FASE MATURITAS ELITE	
Periode	Tren/Jalur Rekrutmen	Periode Maturitas	Rulling Elite
1990-an - 1930-an	Pendidikan Moderen	1940-an - 1960-an	Intelektual
1940-an - 1960-an	Perjuangan Fisik	1970-an - 1990-an	Angkatan Bersenjata
1960-an - 1990-an	Organisasi Massa/Politik	2000-an - 2020-an	Aktifis
1990-an - Sekarang	Pasar/Dunia Bisnis	2020-an - ?	Enterpreneur/ Bisnisman

Sumber: Tabel ini dikembangkan oleh Alfian berdasarkan opini “Siapakah *Rulling Elite* Indonesia” karya Anies Baswedan, *kompas*, 31 oktober 2006

Pembentukan *rulling elite* Indonesia versi Anies Baswedan (2006)

dibentuk atas dasar dua hal, perekrutan anak-anak muda dan tren utama bangsa. Tren utama bangsa ini berubah dari satu masa ke masa berikutnya seiring dengan perjalanan sejarah. Anak-anak muda yang pada masa mudanya terlibat dalam tren utama yang mewarnai bangsa ini kelak akan menjadi actor-aktor di dalam *rulling elite*. Disinilah kerangka Path Despedence (*historicalinstitutionalisme*) jadi relevan dan powerful.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta ini milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

2. Konsep Elite dalam Islam

Menurut Mulkhan (1989: 17), elite dalam islam dapat disimbolkan dengan adanya ulama, kiai, mubaligh, dan guru ngaji. Pasca Orde Baru, keberadaan ulama tetap menjadi elite penentu dalam kaitannya dengan dunia politik. Hal ini terbukti ketika politik santri memperoleh kemenangan dengan terpilihnya Gus Dur menjadi presiden RI keempat dan Amien Rais menjadi ketua MPR RI. Kedua tokoh ini mewakili organisasi Islam terbesar di negeri ini, NU dan Muhammadiyah. Menurut Latif (2005: 583-584).

Seiring perkembangan zaman zaman, ketika banyak sarjana Muslim belajar ke universitas-universitas Barat dan mulai diperkenalkannya pelajaran-pelajaran umum dalam institusi-institusi pendidikan sekuler, semakin membuat kabur perbedaan antara “ulama” dan “intelektual”. Banyak intelektual tampil sebagai figure-figur keagamaan yang terkemuka, sementara banyak ulama yang tampil sebagai juru bicara terkemuka dalam isu-isu sekuler.

Selain itu, lanjut Latif (2005: 583-584), semakin banyaknya perguruan tinggi agama, dimana banyak ulama yang memiliki gelar akademis dan juga diperkenalkannya fakultas-fakultas umum di perguruan tinggi agama, dimana banyak ulama yang mmiliki gelar akademis dan juga diperkenalkannya fakultas-fakultas umum di perguruan tinggi agama, menciptakan kebinguan apakah para lulusan dari institusi-institusi tersebut sebaiknya disebut sebagai ulama ataukah intelektual. Sebuah kode baru dibutuhkan untuk menandai fusi kedua kategori itu. Titik temu dari fusi tersebut bukanlah terletak pada “intelektual” atau “ulama”, tetapi pada sebuah neologisme yang netral, yaitu



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

“Cendikiawan”. Istilah “Cendikiawan Muslim” menjadi sering dipakai dalam ruang publik Indonesia sejak tahun 1980-an sampai sekarang (pasca Orde Baru), terutama sebagai suatu penanda bagi perkembangan eksplosif dari intelek-ulama dan ulama-intelek Muslim.

Dari sini dapat diketahui, bahwa elite Islam dapat dikategorikan ke dalam dua kelompok, yaitu elite ulama dan elite cendikiawan Muslim. *Pertama* elite ulama. Ulama memiliki tiga criteria: (1) memiliki kedalaman makrifatullah, seperti mempunyai ilmu yang dalam, tingkat ketakwaan yang tinggi, banyaknya amal shaleh, dan berakhlak yang terpuji; (2) kedalaman ilmu syariah dalam arti luas meliputi ilmu aqidah, ilmu hukum, dan ilmu akhlak; (3) kedalaman pengetahuan tentang ayat-ayat kauniyah, yakni ilmu pengetahuan yang didasarkan pada pengetahuan empiris dan eskperimental (Abdurrahman, *BRM* Juni 1995: 14-15).

Kedua elite cendikiawan muslim. Ada tiga unsur yang melekat pada cendikiawan muslim: (1) melakukan analisis terhadap gejala sosial dan pembangunan serta melakukan kritik dengan menulis atau berbicara di seminar-seminar dan diskusi; (2) mengembangkan pemikiran kritis dengan menyusun model-model pengembangan masyarakat; (3) menghasilkan karya-karya profesional di berbagai bidang keilmuan. Faktor lain yang turut mencitrakan kelompok cendikiawan Muslim adalah upaya mereka menerjemahkan dan menampilkan profil dan pemikiran cendikiawan luar negeri. Secara lebih sederhana, cendikiawan Muslim adalah mereka yang pernah mendapatkan pendidikan Barat (Rahardjo, 1996: 25, 26, 66).



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Setelah kita mengetahui kelompok elite Islam, langkah selanjutnya adalah metode apa yang digunakan untuk menganalisa elite yang dimaksud dalam penelitian ini. Karena itu, peneliti menggunakan tiga pendekatan dalam menganalisa elite sebagaimana dikemukakan oleh Putnam (2001: 91-94). *Pertama*, analisa posisional, yang menganggap bahwa elite adalah mereka yang menduduki posisi tertinggi dalam struktur organisasi formal. Analisa posisi ini merupakan teknik yang paling mudah dan paling umum untuk mengetahui siapa yang berkuasa. *Kedua*, analisa reputasional, yang menganggap bahwa elite adalah mereka yang tidak berada pada posisi formal dalam organisasi, namun mereka mengetahui mekanisme politik dari dekat. *Ketiga*, analisa keputusan, yang menganggap bahwa elite adalah mereka yang memiliki pengaruh dan berhasil mengajukan inisiatif atau menentang usul-usul keputusan.

Sedangkan elite yang merupakan cakupan dalam penelitian ini akan menggunakan dua pendekatan, yaitu pendekatan posisional dan pendekatan keputusan. Jika penelitian ini hanya menggunakan pendekatan reputasional dan pendekatan posisional, maka cakupan bahasannya terlalu luas. Begitu juga jika menggabungkan ketiga pendekatan di atas, maka cakupan bahasannya semakin meluas lagi. Sebagai jalan tengah, peneliti menggabungkan dua pendekatan tersebut di atas agar memduahkan menemukan varian perilaku elite, disamping tidak meluasnya pembahasan penelitian ini. Karena itu, penelitian ini pertama-tama akan mengidentifikasi siapa saja elite yang berada di dalam struktur organisasi. Kemudian disaring lagi, siapa saja elite yang memiliki pengaruh



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syaif Kasim Riau

terhadap kebijakan-kebijakan organisasi. Elite-elite inilah yang akan menjadi cakupan bahasan dalam penelitian ini.

2. Sikap Politik Elite Islam

Mengkaji tentang sikap politik (*political attitudes*) berarti mengkaji tentang pemikiran dan pandangan seseorang yang didasarkan pada pendirian mereka berupa pendapat atau keyakinan (KBBI, 1990: 838). Karena itu, penelitian ini akan memfokuskan pada bagaimana pemikiran dan pandangan politik elite NU dalam merespon dinamika seputar Islam dan politik.

Dalam mengkategorisasikan sikap politik elite, digunakan tesis tarik-menarik antara dua kutub ekstrim, yaitu sikap inklusif dan eksklusif. Sikap inklusif lebih mengedepankan substansi (bahkan lebih dari sekadar susbtansi) daripada simbol. Sedangkan sikap eksklusif lebih mengedepankan simbol daripada substansi. Dua kutub ekstrem inilah yang selalu mewarnai siakp politik kalangan elite menengah Muslim di Indonesia.

Model bentangan dua kutub ekstrem ini, menurut Nashir (2000: 150-151), juga dikembangkan dalam teori Daniel S. Lev tentang golongan atau kelas menengah dalam konteks Orde Baru yang melahirkan polarisasi politik sebagaimana pendapat Mahsin, bahwa setelah tahun 1996, kelas menengah mulai berkembang pesat dalam iklim ekonomi Orde Baru yang menguntungkan sampai batas tertentu menguntngkan secara politik.

Hubungan kelas menengah dengan pemerintah Orde Baru menunjukkan kecenderungan terpecah-belah oleh beragam orientasi terhadap negara, terhadap



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kekuasaan politik. Jika menguntungkan, akan berdampak menyenangkan. Sebaliknya, jika antagonistik, akan berdampak tidak menyenangkan.

Atas dasar itulah, peneliti mencoba mengkategorisasikan sikap politik elite Islam yang pernah menjadi kajian terdahulu ke dalam tiga model sikap sebagaimana tergambar dalam tabel berikut.

Tabel 2.6 Kategorisasi Sikap Politik Islam

Model Inklusif		Model Moderat	Model Eksklusif	
Akomodatif	Transformatik	Idealistik	Formalistik	Totalistik
Pragmatis	Kritis	Moderat	-	-
-	Realistik	Substantivistik	-	-

Sumber: Data Olahan Tahun 2019

Kategorisasi di atas pada kenyataannya bisa saja mengalami kombinasi antara satu sikap dengan sikap yang lainnya, asalkan relevan dengan penelitian ini. Secara lebih detail, berikut ini akan dijelaskan kriteria masing-masing sikap mulai dari model eksklusif dan dilanjutkan ke model moderat hingga model inklusif dengan merujuk pada sejumlah kajian-kajian terdahulu.

- Sikap politik totalistik. Kelompok ini mendasarkan sikapnya pada teks yang bersumber dari wahyu, sehingga tidak ada ruang kosong kenyataan yang majemuk (Anwar, 1995: 175-176).



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- b. Sikap politik formalistik. Kelompok ini mendasarkan sikapnya pada ketaatan ajaran Islam. Mereka lebih menekankan pada politisasi yang cenderung menopang bentuk-bentuk masyarakat politik Islam seperti yang dibayangkan. Bentuk-bentuk itu muncul dengan adanya partai islam, ekspresi simbolis, hingga pada sistem ketatanegaraan Islam (Anwar, 1995: 144-145).
- c. Sikap politik idealistik. Kelompok ini mendasarkan sikapnya pada “Islam cita-cita” yang sesuai Al-Qur’an dan As-Sunnah. Perumusan “Islam cita-cita” sebagai pembeda dengan “Islam sejarah”, yakni Islam ang dipahami ke dalam konteks sejarah oleh umat Islam (Anwar, 1995: 178-179).
- d. Sikap politik moderat. Kelompok ini berada di tengah-tengah antara sikap formalistik dan sikap pragmatis, sehingga tidak memiliki kecenderungan pada salah satu di antara keduanya (Nashir, 2000: 150-151).
- e. Sikap politik substantivistik. Kelompok ini lebih menekankan substansi daripada symbol-simbol keagamaan yang sifatnya tekstual. Ajaran islam memiliki makna-makna universal dan harus dikontekstualisasikan dengan realitas sosial (Anwar, 1995: 155-156).
- f. Sikap politik transformatik. Kelompok ini mendasarkan sikapnya pada misi kemanusiaan. Ajaran-ajaran Islam harus dikebumikan agar menjadi kekuatan yang mampu membebaskan manusia dari ketidakadilan, kebodohan, dan keterbelakangan. Proses islamisasi direfleksikan dalam karya-karya produktif yang berorientasi pada perubahan sosial (Anwar, 1995: 162).



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarar mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- g. Sikap politik kritis. Kelompok ini mendasarkan sikapnya pada penyelesaian persoalan dengan melihat aspek sistem dan struktur sebagai sumber masalah. Pendekatan struktural membantu menganalisa dan mengidentifikasi ketidakadilan serta kesalahpahaman dalam memahami realitas, misalnya aksi terorisme (Fakih, 2001: 35).
- h. Sikap politik realistik. Kelompok ini lebih menekankan pada keterkaitan antara dimensi substantive dengan konteks realitas sosial yang ada. Islam perlu dihadirkan secara realistik dalam keragaman yang diwarnai oleh perjalanan sejarah (Anwar, 1995: 182-183).
 - i. Sikap politik akomodatif. Kelompok ini lebih menunjukkan hubungan baik serta mengembangkan kerjasama, tetapi tetap bersikap kritis atas penyimpangan tanpa mengintegrasikan diri ke dalam lingkaran kekuasaan. Sikap ini cenderung lentur dalam menghadapi perkembangan politik (Jurdi, 2010: 40).
 - j. Sikap politik pragmatis. Kelompok ini memiliki pandangan, agar umat Muslim menempuh langkah-langkah praktis, harus meninggalkan pandangan-pandangan yang idealistic. Sikap ini juga menghendaki ditinggalkannya pola politik yang diwarnai konflik pribadi dan konflik golongan (Nashir, 2000: 42).

2. Faktor-faktor yang Mempengaruhi

Sikap politik tidak hanya bersifat tunggal (Jurdi, 2010:35). Karena itu, sikap politik bisa gabungan, tidak hanya terdiri dari satu sikap saja. Kemudian,



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

munculnya sikap politik yang beragam tersebut tidak bisa dilepaskan oleh faktor-faktor yang beragam. Berpijak pada analisa Surbakti (1992: 132-133) dan Budiarjo (2007: 49), penelitian ini memfokuskan pada dua faktor yang mempengaruhi sikap politik elite.

Pertama, kategori latar belakang sosiologis. Secara sosiologis, latar belakang seseorang dapat diidentifikasi, antara lain berupa jenis kelamin, umur, pendidikan, asal daerah, suku bangsa, paham keagamaan, pekerjaan, pergaulan, pengalaman organisasi, orientasi hidup individu, latar belakang keluarga, dan lain sebagainya. Dalam konteks penelitian ini, latar belakang sosiologis difokuskan pada empat faktor yang akan menjadi kecenderungan utama dalam mempengaruhi sikap-sikap politik mereka, yaitu faktor pendidikan, pekerjaan, relasi atau pergaulan, dan orientasi politik individu.

Kedua, kategori organisatoris. Secara terperinci, kategori organisatoris terbagi menjadi tiga faktor: (1) faktor budaya politik organisasi, yaitu pandangan dan sistem nilai yang terkait erat dengan setiap keputusan politis dan sudah berlaku di dalam sebuah organisasi (Nashir, 2000: 53-54); (2) faktor kepentingan politik organisasi, yaitu tujuan dan target yang dikejar oleh sebuah organisasi dari hasil proses politik (Budiarjo, 2007: 49; Firmanzah, 2008: 52); (3) faktor kebijakan organisasi. Setiap organisasi pasti memiliki keputusan resmi dalam menyikapi segala hal yang berimplikasi pada kehidupan manusia secara umum dan organisasinya secara khusus. Setiap keputusan yang dibuat tentu sudah mengalami proses pemufakatan di internal elite organisasi yang harus ditaati oleh seluruh pihak yang terlibat dalam organisasi tersebut.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syaif Kasim Riau

2.3 NU dan Elite Politik

NU sebagai salah satu organisasi Islam terbesar di Indonesia juga memiliki tokoh-tokoh yang masuk dalam politik di Indonesia, didalam sejarah politik Indonesia, NU bukan merupakan organisasi baru dalam dunia politik Indonesia, namun sejak kelahirannya organisasi ini sudah ikut andil dalam memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Para tokoh-tokoh NU inilah yang kemudian disebut sebagai elite politik.

Kehadiran para elite NU dalam politik di Indonesia dari masa Indonesia sebelum merdeka hingga masa revolusi. Kehadiran para elite NU mengalami pasang surut, terlebih ketika NU menyatakan kembali ke *Khittah 1926*. *Khittah 1926* artinya landasan berpikir, bersikap, dan bertindak warga NU yang harus dicerminkan dalam tingkah laku perseorangan maupun organisasi serta dalam setiap pengambilan keputusan (Kacung Marijan, 1992: xvii).

Namun perjuang para elite NU untuk terlibat dalam politik di Indonesia tidak berhenti begitu saja, pasca revolusi NU semakin menunjukkan wajahnya dalam perpolitikan di Indonesia. Terbukti dengan terpilihnya Abdur Rahman Wahid sebagai presiden ke 4 Republik Indonesia, Seiring berjalannya waktu, kehadiran para elite-elite NU dalam politik di Indonesia kembali melebarkan sayapnya dengan majunya KH Ma'ruf Amin sebagai calon wakil presiden yang didukung oleh beberapa partai islam.

Kehadiran para Elite NU tersebut dalam pemilihan presiden tahun 2019, merupakan bukti nyata bahwa, para elite NU memberikan pengaruh yang cukup

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Di larang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Di larang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

besar dalam proses pengambilan keputusan dalam suatu pemerintahan di Indonesia, dalam hal ini menunjukan bahwa NU pada perpolitikan di Indonesia tidak bisa dipisahkan.

Salah satu fenomena menarik yang dapat kita kaji dari pemilu presiden adalah kian nampaknya perpecahan elite ditubuh NU. Meski NU merupakan organisasi keagamaan, namun seringkali naluri politik yang ditampilkan oleh para tokoh NU menyeret NU secara kelembagaan ke pusaran utama politik praktis. Rivalitas antar-calon yang banyak berlatar belakang kaum Nahdliyin membawa implikasi perpecahan hingga ke tingkat akar rumput. (Faisal Ismail, 2004: 63).

Akibatnya, muncul polarisasi kekuatan politik antar-elite dan warga NU. Menurut KH. Mustofa Bisri, banyak partai politik yang meminang NU sehingga menjadi tidak karuan, seperti orang *kemerauk* (Majalah Tempo, 2004: 41). Kita tentunya menyadari bahwa hingga saat ini budaya politik yang dominan di kalangan NU adalah politik *patron-client*. Karena itu, ketika patronnya terlibat konflik dengan tokoh sesama NU (atau dengan tokoh lain), maka dengan sendirinya lapisan warga NU di bawah menjadi terkotak-kotak dan terkoyak-koyak. (Faisal Ismail, 2004: 67).

2. Administrasi Kepemiluan

Pemilu diselenggarakan dengan tujuan untuk memilih wakil rakyat dan wakil daerah, serta untuk membentuk pemerintahan yang demokratis, kuat, memperoleh dukungan rakyat dalam rangka mewujudkan tujuannasional sebagaimana Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Diarangi mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pemilihan umum (Pemilu) menurut Haris (2006: 10) merupakan salah satu bentuk pendidikan politik bagi rakyat, yang bersifat langsung, terbuka, masal, yang diharapkan bisa mencerdaskan pemahaman politik dan meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai demokrasi. UU No. 7 Tahun 2017 tentang pemilu, ditegaskan dalam UU ini, pemilu dilaksanakan berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Menurut Huntington dalam Rizkiyansyah (2007: 3) menyatakan bahwa sebuah negara bisa disebut demokratis jika didalamnya terdapat mekanisme pemilihan umum yang dilaksanakan secara berkala atau periodik untuk melakukan sirkulasi elite”.

Menurut Dani (2006: 11) pemilu merupakan sarana demokrasi untuk membentuk sistem kekuasaan negara yang pada dasarnya lahir dari bawah menurut kehendak rakyat sehingga terbentuk kekuasaan negara yang benar-benar memancar ke bawah sebagai suatu kewibawaan yang sesuai dengan keinginan rakyat dan untuk rakyat.

Menurut Rahman (2002: 194), pemilu merupakan cara dan sarana yang tersedia bagi rakyat untuk menentukan wakil-wakilnya yang akan duduk dalam Dewan Perwakilan Rakyat guna menjalankan kedaulatan rakyat, maka dengan sendirinya terdapat berbagai sistem pemilihan umum. Sedangkan, Rizkiyansyah (2007 : 3) “Pemilihan Umum adalah salah satu pranata yang paling representatif atas berjalannya demokrasi, tidak pernah ada demokrasi tanpa pemilihan umum”.

Penjelasan di atas menunjukkan bahwa pemilihan umum sebagai sarana terwujudnya demokrasi. Pemilihan umum adalah suatu alat yang penggunaannya tidak boleh mengakibatkan rusaknya sendi-sendi demokrasi dan bahkan



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

menimbulkan hal-hal yang menderitakan rakyat, tetapi harus tetap tegaknya Pancasila dan dipertahankannya Undang-Undang Dasar 1945. Permana dalam Padhanawati (2005: 85) kata kunci dari pemilu langsung oleh rakyat adalah “kedaulatan rakyat”.

Dengan demikian, reputasi demokrasi tidak diragukan lagi adalah pemaknaan yang sesungguhnya dari kedaulatan rakyat itu sendiri. Schumpeter dalam Sorensen (2003: 14) merumuskan pengertian demokrasi secara sederhana merupakan sebuah metode politik, sebuah mekanisme untuk memilih pemimpin politik. Warga negara diberikan kesempatan untuk memilih salah satu di antara pemimpin-pemimpin politik yang bersaing meraih suara.

Pengertian demokrasi menunjukan bahwa keikutsertaan rakyat merupakan kunci utama dalam menjalankan sistem pemerintahan yang demokrasi. Keikutsertaan rakyat dalam sistem pemerintahan bisa dilakukan secara langsung oleh rakyat itu sendiri maupun melalui perwakilan hal tersebut dapat terwujud dengan dilaksanakannya Pemilihan Umum di Negara Indonesia.

Mayo dalam Kristiadi (2006: 117) memberikan definisi demokrasi sebagai berikut : Sistem politik yang demokratis ialah dimana kebijaksanaan umum ditentukan atas dasar mayoritas oleh wakil-wakil yang diawasi secara efektif oleh rakyat dalam pemilihan-pemilihan berkala yang didasarkan atas prinsip kesamaan politik dan diselenggarakan dalam suasana terjaminnya kebebasan politik.

Pendapat Mayo tersebut oleh Kristiadi (2006: 118) disimpulkan “bahwa



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

demokrasi tidak hanya merupakan suatu sistem pemerintahan, tetapi juga suatu gaya hidup serta tata masyarakat tertentu, karena itu juga mengandung unsur-unsur moral. Dalam rangka itu dapat dikatakan bahwa demokrasi didasari oleh beberapa nilai (*values*)". Nilai-nilai dalam demokrasi tersebut menurut Mayo dalam Kristiadi (2008: 118) adalah :

- Menyelesaikan perselisihan dengan damai dan secara melembaga (*institutionalized peaceful settlement of conflict*),
- Menjamin terselenggaranya perubahan secara damai dalam suatu masyarakat yang sedang berubah (*peaceful change in a changing society*),
- Menyelenggarakan pergantian pimpinan secara teratur (*orderly succession of rules*),
- Membatasi pemakaian kekerasan sampai minimum (*minimum of coercion*),
- Mengakui serta menganggap wajar adanya keanekaragaman (*diversity*),
- Menjamin tegaknya keadilan.

Diamond, Linz dan Lipset dalam Sorensen (2003: 19) memaknai demokrasi sebagai sebuah sistem pemerintahan yang memenuhi tiga kondisi-kondisi berikut :

- Kompetisi yang luas dan bermakna di antara individu dan kelompok organisasi (khususnya partai-partai politik) pada seluruh posisi kekuasaan pemerintah yang efektif, dalam jangka waktu yang teratur dan meniadakan penggunaan kekerasan;



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- b. Tingkat partisipasi politik yang inklusif dalam pemilihan pemimpin dan kebijakan, paling tidak melalui pemilihan bebas secara teratur, dan tidak ada kelompok sosial (dewasa) utama yang disingkirkan;
- c. Tingkat kebebasan politik dan sipil, yaitu kebebasan berpendapat, kebebasan pers, kebebasan untuk mendirikan dan menjadi anggota organisasi, yang cukup untuk memastikan integritas partisipasi dan kompetisi politik. Berdasarkan nilai-nilai beserta kondisi-kondisi demokrasi di atas makadalam pemilihan umum juga terdapat nilai-nilai dan kondisi-kondisi tersebut. Pemilihan umum dapat dikatakan sebagai suatu “pesta demokrasi” di negara Indonesia.

Mencermati praktik pemilu dalam sistem politik modern, Fatah dalam Rizkiyansyah (2007: 4) menyatakan bahwa : “Pemilu dapat dibedakan menjadi dua tipe. *Pertama*, pemilu sebagai formalitas politik, yakni, pemilu hanya dijadikan alat legalisasi pemerintahan nondemokratis. Pemilunya sendiri dijalankan secara tidak demokratis; *Kedua*, yakni pemilu sebagai alat demokrasi, pemilu dijalankan secara jujur, bebas, bersih, kompetitif, dan adil. pemerintah yang menyelenggarakan Pemilu bahkan kerap kali menerima kenyataan bahwa Pemilu yang mereka adakan justru menyingkirkan mereka dari tampuk kekuasaan.”

Pemilu kepala daerah yang dilaksanakan di Indonesia saat ini merupakan pemilu yang ditempatkan pada tipe kedua yaitu pemilu sebagai alat demokrasi untuk menciptakan suatu pemerintahan yang refresentatif yang dijalankan secara jujur, bebas, bersih, kompetitif dan adil, berbeda dengan pemilu-pemilu yang



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

diaksanakan pada zaman orde baru. Pemilu pada zaman orde baru merupakan pemilu tipe pertama yaitu sebagai formalitas politik untuk melegalisasi pemerintahan Soeharto.

Fungsi pemilu di antara lain seperti yang diungkapkan oleh Sanit dalam Pito (2007: 307) yang mengklasifikasikan ada empat fungsi pemilihan umum sebagai berikut yaitu legitimasi politik, terciptanya perwakilan politik, sirkulasi elite politik dan pendidikan politik. Selain fungsi yang diungkapkan oleh Sanit, pemilu juga memiliki fungsi seperti yang diungkapkan oleh Croisant dalam Pito (2007: 306) yang menyatakan secara fungsional pemilu harus memenuhi tiga tuntutan yaitu :

- a. Pemilu harus mewakili rakyat dan kehendak politik pemilih.
- b. Pemilu harus dapat mengintegrasikan rakyat.
- c. Keputusan, sistem pemilu harus menghasilkan mayoritas yang cukup besar guna menjamin stabilitas pemerintahan dan kemampuannya untuk memerintah (*governabilitas*).

Berdasarkan penjelasan para ahli, dapat disimpulkan bahwa melalui pemilu sistem demokrasi dapat diwujudkan. Legitimasi kekuasaan yang diperoleh pemerintah menjadi kuat dan absah karena hal tersebut merupakan hasil pikiran rakyat yang memiliki kedaulatan. Selain sebagai mekanisme demokrasi, pemilu ini juga memiliki tujuan sebagai pendidikan politik rakyat yang dapat menumbuhkembangkan kesadaran rakyat akan hak dan kewajiban politiknya.

Dalam melaksanakan pemilu diperlukan suatu sistem yang representatif

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengummumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

yang sesuai dengan situasi dan kondisi negara/wilayah yang akan menyelenggarakannya. Saragih dalam Pito (2006: 304) mengatakan bahwa dalam sistem pemilihan umum mengandung karakteristik sistem yang meliputi *electoral laws* atau hukum dasar pemilu dan *electoral process* atau proses pemilu.

Electoral laws merupakan pelaksanaan sistem yang sudah ada aturan-
annya secara umum. Yakni aturan yang menata bagaimana pemilu itu
dilakukan bagaimana distribusi hasil pemilu ditetapkan dan sebagainya.
Sedangkan *electoral process* yaitu mekanisme pelaksanaan suatu pemilu, antara
lain siapa panitia penyelenggaraan pemilu, partai/organisasi peserta pemilu,
penentuan calon-calon, cara dan tempat kampanye, kotak suara, tempat dan
jumlah TPS, saksi, perpindahan pemilihan dan sebagainya.

Makna demokrasi dapat disimpulkan bahwa untuk mewujudkan sistem demokrasi salah satunya adalah melalui pemilihan umum yang melibatkan partisipasi politik warga negara sebanyak-banyaknya. Partisipasi politik merupakan kriterium penting demokrasi. Krisis partisipasi politik terjadi jika tindakan-tindakan tidak tertampung atau tersalurkan melalui dewan perwakilan, media massa, organisasi-organisasi sosial politik lembaga pemerintahan atau lembaga-lembaga yang sah lainnya.

Krisis partisipasi menurut Kusumowidagdo dalam Rais (2005: 158), adalah konflik atau bentrokan yang terjadi apabila elite pemerintah menganggap tidak sah tuntutan-tuntutan atau tingkah laku individu-individu atau kelompok yang ingin berperan serta dalam sistem politik (Negara). Beberapa kondisi yang dapat menimbulkan krisis partisipasi yaitu:



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- a. Jika elite pemerintah menganggap dirinya saja yang berhak memerintah oleh karena itu menolak tuntutan-tuntutan kelompok-kelompok sosial politik untuk berperan serta dalam pemerintahan.
- b. Jika organisasi-organisasi yang dibentuk kelompok-kelompok masyarakat untuk menyalurkan kepentingan mereka dianggap tidak sah oleh pemerintah.
- c. Cara-cara yang digunakan kelompok-kelompok masyarakat dianggap tidak sah oleh elite pemerintahan
- d. Jika jenis tuntutan yang dikemukakan kelompok-kelompok masyarakat dianggap tidak sah oleh pemerintah.

Pada sistem yang demokratis, tujuan dari pelaksanaan pemilu pun harus mencerminkan adanya kehendak dan partisipasi rakyat. Pemilihan Umum memiliki beberapa tujuan. Menurut Surbakti (1992: 181) ada tiga hal dalam tujuan pemilu, yaitu :

- a. Sebagai mekanisme untuk menyeleksi para pemimpin pemerintah dan alternatif kebijakan umum.
- b. Pemilu juga dapat dikatakan sebagai mekanisme memindahkan konflik kepentingan dari masyarakat kepada badan-badan perwakilan rakyat yang terpilih melalui partai-partai yang memenangkan kursi sehingga integrasi tetap terjamin
- c. Pemilu merupakan sarana memobilisasikan dan atau menggalang dukungan rakyat terhadap negara dan pemerintah dengan jalan ikut serta dalam proses politik. Jadi tujuan pemilu adalah sarana untuk memilih



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

wakil rakyat, wakil daerah, membentuk pemerintahan yang demokratis, kuat dan legitimasi dari rakyat serta memberdayakan warga negara dalam kegiatan politik. Dan fungsi dari pemilu adalah sebagai alat demokrasi.

Berdasarkan pemaparan dari para ahli, dapat disimpulkan bahwa demokrasi saat ini merupakan sistem pemerintahan yang memperhatikan hak-hak yang dimiliki oleh rakyat. Baik hak untuk ikut serta dalam pemerintahan maupun haknya sebagai warga sipil. Dalam demokrasi, rakyat harus diikutsertakan dalam setiap pengambilan keputusan atau kebijakan politik, termasuk dalam menentukan seorang pemimpin. Salah satu upaya untuk mengikutsertakan rakyat dalam pemerintahan adalah melalui pemilihan umum.

Menurut Rahman (2002: 177) sistem pemilihan umum biasanya diatur dalam perundang-undangan, setidaknya mengandung tiga variable pokok, yaitu :

- a. Penyuaaran (*balloting*). Artinya tata cara yang harus diikuti pemilih yang berhak dalam memberikan suara.
- b. Daerah pemilihan umum (*electoral district*). Artinya ketentuan yang mengatur berapa jumlah kursi wakil rakyat untuk setiap daerah pemilihan.
- c. Formula pemilihan. Artinya rumus yang digunakan untuk menentukan siapa atau partai politik apa yang memenangkan kursi di suatu daerah pemilihan”.

Konstitusi Indonesia mengatur mengenai pemilihan umum di Indonesia di dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 22E, untuk menjamin hak rakyat Indonesia dalam memilih pemimpin dan wakil pilihan mereka. Dalam Undang-



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Undang Dasar 1945 Pasal 22E dijelaskan pemilihan umum dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil setiap lima tahun sekali sesuai dengan UU No. 11 Tahun 2011 tentang penyelenggara pemilihan umum.

Darmastuti dan Maryanah (2004: 48) menjelaskan ada beberapa prinsip pemilihan umum yang perlu dijamin, yaitu :

a. Keadilan

Prinsip ini sangat diperlukan agar seluruh rakyat memiliki hak yang sama untuk memilih dan dipilih. Selain itu prinsip ini juga diperlukan agar seluruh peserta pemilihan umum, baik yang berupa partai politik, perorangan, maupun independen mendapat perlakuan yang sama dari pelaksanaan pemilihan umum. Tanpa keadilan, maka tidak ada jaminan bahwa kedaulatan rakyat dapat direalisasikan.

b. Kejujuran

Kejujuran bukan hanya perlu ditujukan kepada pelaksanaan pemilihan umum sehingga hasil pemilihan umum akan sah (*legitimate*) karena tidak terjadi kecurangan administrasi dan perhitungan, tetapi juga perlu

c. Umum

Prinsip ini mengandung pengertian bahwa seluruh rakyat tanpa kecuali memiliki hak untuk memilih. Prinsip umum ini dikemukakan untuk menjamin hilangnya berbagai faktor yang pada masa lalu sering menjadi dasar diskriminasi, antara lain karena faktor status sosial, warna kulit dan ras, jenis kelamin, agama, pandangan politik dan sebagainya.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

d. Bebas

Prinsip ini sangat esensial untuk menjamin agar pemilu tidak dilaksanakan dengan cara intimidasi. Rakyat harus memiliki kebebasan mengekspresikan pilihan politiknya karena prinsip ini akan menjamin diperolehnya informasi tentang kehendak rakyat yang sesungguhnya, berkenaan dengan siapa-siapa yang dipercaya menjadi wakil atau menjadi pejabat politik oleh rakyat, sekaligus apa ideologi, program dan aktivitas politik yang dipilih oleh sebagian besar rakyat.

e. Kerahasiaan

Kerahasiaan pilihan adalah prinsip pemilu yang sangat penting karena prinsip ini menjamin pemilih tidak akan mendapat intimidasi karena pilihan politiknya.

f. Langsung

Rakyat harus langsung memilih pilihan politiknya.

Karena itu administrasi pemilu dirancang sedemikian rupa sehingga setiap orang termasuk penyandang cacat, dapat langsung memilih tanpa perlu mewakilkannya kepada orang lain.

Di Indonesia telah berulang kali diselenggarakan pemilihan umum yang disebut sebagai pesta demokrasi rakyat Indonesia, baik sewaktu orde lama, orde baru dan orde reformasi (Syafiie, 2005: 136). Dalam ilmu politik dikenal bermacam-macam sistem pemilu, akan tetapi umumnya berkisar pada dua prinsip pokok yaitu sistem distrik (*single-member constituency* dan sistem



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

proporsional/perwakilan berimbang (*multi-member constituency*). (Kristiadi, 2008: 461).

Sistem distrik (*single-member constituency*) diselenggarakan berdasarkan lokasi daerah pemilihan, dalam arti tidak membedakan jumlah penduduk, tetapi berkiblat pada tempat yang sudah ditentukan. Jadi daerah yang sedikit penduduknya memiliki wakil yang sama dengan daerah yang padat penduduknya.

Oleh karena itu, sudah barang tentu akan banyak suara yang terbuang, tetapi karena wakil yang akan dipilih adalah orangnya langsung, maka pemilih akan akrab dengan wakilnya (*personen stelse*), data distrik biasanya memiliki satu wakil (Syafiie, 2005: 136-137).

Adapun keuntungan dengan menggunakan sistem distrik menurut Kristiadi (2006: 466) adalah sebagai berikut :

- a. Sistem ini lebih mendorong ke arah integritas partai-partai politik karena kursi yang diperebutkan dalam setiap distrik pemilihan hanya satu.
- b. Fragmentasi partai dan kecenderungan membentuk partai baru dapat dibendung.
- c. Karena kecilnya distrik, maka wakil yang terpilih dapat dikenal oleh komunitasnya, sehingga hubungan dengan konstituen lebih erat.
- d. Bagi partai besar sistem ini menguntungkan karena melalui *distortion effect* dapat meraih suara dari pemilih-pemilih lain, sehingga memperoleh kedudukan mayoritas.
- e. Lebih mudah bagi suatu partai untuk mencapai kedudukan mayoritas dalam parlemen, sehingga tidak perlu diadakan koalisi dengan partai



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

lain.

- Sistem ini sederhana dan murah untuk diselenggarakan.

Selain keuntungan dalam menggunakan sistem distrik ini Kristiadi (2006: 467) juga mengungkapkan beberapa kelemahannya.

Kelemahan tersebut antara lain :

- Sistem ini kurang memperhatikan adanya partai-partai kecil dan golongan minoritas, apalagi jika golongan ini terpecah dalam beberapa distrik;
- Sistem ini kurang representatif dalam arti bahwa calon yang kalah dalam suatu distrik, kehilangan suara-suara yang telah mendukungnya. Hal ini berarti bahwa ada sejumlah suara yang tidak diperhitungkan sama sekali;
- Sistem distrik dianggap kurang efektif dalam masyarakat yang plural karena terbagi dalam kelompok etnis, religious, dan tribal;
- Ada kemungkinan si wakil cenderung untuk lebih memperhatikan kepentingan distrik serta warga distriknya, daripada kepentingan nasional.

Penggunaan sistem distrik ini lebih cocok pada negara yang masyarakatnya homogen dan hanya memiliki dua partai (*dwi party*). Sistem distrik ini lebih cenderung mengarah pada desentralisasi. Di Indonesia sistem distrik ini digunakan dalam penyelenggaraan pemilihan kepala daerah, pemilihan umum untuk memilih anggota DPD.

Sistem proporsional/perwakilan berimbang (*multi-member constituency*) berakibat kepada jumlah penduduk yang akan menjadi peserta memilih. Sistem ini



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Diarangi mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dimaksud untuk menghilangkan beberapa kelemahan dari sistem distrik. Rizkiyansyah (2007: 7) menyatakan bahwa: “Sistem proporsional adalah sistem yang muncul karena ada ketidakpuasan terhadap sistem distrik. Gagasan pokok sistem ini adalah jumlah kursi yang diperoleh oleh suatu partai adalah sesuai dengan jumlah suara yang diperolehnya dari masyarakat.”

Dalam sistem ini setiap suara, dalam arti bahwa suara lebih yang diperoleh oleh suatu partai atau golongan dalam sesuatu daerah pemilihan dapat ditambahkan pada jumlah suara yang diterima oleh partai atau golongan itu dalam daerah pemilihan lain, untuk menggenapkan jumlah suara yang diperlukan guna memperoleh kursi tambahan. Sama halnya dengan sistem distrik, sistem proporsional ini juga memiliki kelebihan dan kelemahan.

Mengutip pendapat Kristiadi (2006: 467), bahwa kelebihan sistem ini adalah sebagai berikut :

- a. Sistem proporsional dianggap refresentatif, karena jumlah kursi dalam parlemen sesuai dengan jumlah suara masyarakat yang diperoleh dalam pemilihan umum ;
- b. Sistem proporsional dianggap lebih demokratis dalam arti lebih *egalitarian* karena praktis tanpa ada distorsi.

Sedangkan untuk kelemahannya, penulis pun masih mengutip pendapat Kristiadi (2006: 469). Kelemahan dalam sistem proporsional ini antara lain:

- a. Sistem ini kurang mendorong partai-partai untuk berintegrasi atau bekerja sama satu sama lain dan memanfaatkan persamaan-persamaan



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

yang ada, tetapi sebaliknya, cenderung mempertajam perbedaan-perbedaan;

- Sistem ini mempermudah fragmentasi partai. Jika timbul konflik dalam suatu partai anggotanya cenderung memisahkan diri dan mendirikan partai baru;

- Sistem proporsional memberikan kedudukan yang kuat pada pemimpin partai;

- Wakil yang terpilih kemungkinan renggang ikatannya dengan konstituennya;

- Karena banyaknya partai yang bersaing, sulit bagi suatu partai untuk meraih mayoritas dalam parlemen, yang diperlukan untuk membentuk pemerintahan pada sistem pemilu proporsional yang diutamakan dan dikampanyekan adalah program atau ideologi partai-partai politik tersebut.

- Berbeda dengan system distrik yang lebih mengutamakan kepopuleran seseorang . Sistem proporsional ini di Indonesia digunakan pada saat penyelenggaraan pemilu untuk memilih anggota DPR dan DPRD.

Pemilihan umum di Indonesia menganut asas “Luber” yang merupakan

singkatan dari “Langsung, Umum, Bebas dan Rahasia”. Asas “Luber” sudah ada sejak zaman Orde Baru. Kemudian di era reformasi berkembang pula asas “Jurdil” yang merupakan singkatan dari “Jujur dan Adil”. Adapun yang dimaksud dengan asas “Luber dan Jurdil” dalam pemilu. Asas “Luber dan Jurdil” pemilu



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

menurut UU No. 7 tahun 2017, tentang Pemilihan Umum anggota DPR, DPD dan DPRD. Dalam UU No. 10 Tahun 2008, asas pemilihan umum meliputi :

- a. Langsung, artinya rakyat pemilih mempunyai hak untuk secara langsung memberikan suaranya sesuai dengan kehendak hati nuraninya tanpa perantara.
- b. Umum, artinya semua WN yang telah berusia 17 tahun atau telah menikah berhak untuk ikut memilih dan telah berusia 21 tahun berhak di pilih dengan tanpa ada diskriminasi (pengecualian).
- c. Bebas, artinya rakyat pemilih berhak memilih menurut hati nuraninya tanpa adanya pengaruh, tekanan atau paksaan dari siapapun/dengan apapun.
- d. Rahasia, artinya rakyat pemilih dijamin oleh peraturan tidak akan diketahui oleh pihak siapapun dan dengan jalan apapun siapa yang dipilihnya atau kepada siapa suaranya diberikan (secret ballot).
- e. Jujur, dalam penyelenggaraan pemilu, penyelenggaraan pelaksana, pemerintah dan partai politik peserta pemilu, pengawas dan pemantau pemilu, termasuk pemilih, serta semua pihak yang terlibat secara tidak langsung, harus bersikap jujur sesuai dengan peraturan perundangundangan yang berlaku.
- f. Adil, dalam penyelenggaraan pemilu setiap pemilihan dan partai politik peserta pemilu mendapat perlakuan yang sama serta bebas dari kecurangan pihak manapun.

2.10. Pemilihan Presiden (Pilpres)

Pemilihan presiden atau yang sering disingkat dengan Pilpres yang diselenggarakan pada tanggal 17 April 2019 untuk memilih presiden dan wakil presiden Indonesia untuk masa bakti 2019-2024, merupakan pemilihan umum langsung yang dilaksanakan untuk yang ke-empat kalinya untuk memilih presiden dan wakil presiden Indonesia.

Pemilihan umum di Indonesia merupakan pesta demokrasi yang berlangsung lima tahun sekali pasca reformasi, merupakan salah satu wadah aspirasi bagi masyarakat Indonesia untuk menentukan pilihan yang nantinya akan menjadi pemimpin bagi mereka, proses pemilihan umum untuk menentukan presiden dan wakilnya dilakukan secara serentak.

Dalam undang-undang republik Indonesia nomor 42 tahun 2008 tentang pemilihan Umum presiden dan wakil presiden pasal 2 menjelaskan bahwa pemilu presiden dan wakil presiden dilaksanakan secara efektif dan efisien berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.

Di negara demokrasi pemilihan umum merupakan hal terpenting yang tidak bisa dilepaskan ataupun dihilangkan, karena sistem demokrasi menjunjung tinggi asas kebebasan dalam berpendapat dan menentukan pilihan. Inilah yang kemudian menjadikan pemilu sebagai tolak ukur penting dalam sistem demokrasi, karena hasil dari pemilihan umum yang diselenggarakan dalam suasana keterbukaan dengan kebebasan berpendapat dan kebebasan berserikat, dianggap mencerminkan dengan agak akurat partisipasi serta aspirasi masyarakat.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Fenomena pilpres 2019 menjadi ajang dua kandidat calon presiden – Prabowo-Sandi dan Jokowi-Ma`ruf. Kelompok Islam pun banyak kelimpungan. Mereka yang mendukung pasangan Jokowi-Ma`ruf, diusung oleh partai Islam yakni PKB dan PPP. Dua partai tersebut punya hubungan yang intim dengan organisasi besar Nahdlatul Ulama. Selain itu, di kubu Prabowo-Sandi diusung oleh PKS, PAN dan PBB. Dalam partai-partai, hanya PAN yang memiliki kedekatan emosional juga dengan organisasi besar Nahdlatul Ulama.

NU sebagai organisasi pada zaman ini masih terikat oleh mandat dari *Khittah* NU yang dilahirkan dan dimantapkan oleh Mukhtar NU ke-27 tahun 1984 di Situbondo. Periode ini duet kepemimpinan NU masih dipegang oleh : KH. MA. Sahal Mahfudz sebagai Rais Am Syuriyah PBNU, dan KH. Hasyim Muzadi sebagai Ketua Umum Tanfidziyah PBNU. (Nur Khalik Ridwan, 2016 : 427-428).

Di dalam sejarah, kekuatan utama NU adalah para kiai (Ulama), oleh karena itu organisasi ini dinamakan Nahdlatul Ulama dan bukan Nahdlatul Muslimin atau Nahdlatul Ummah. Dalam Perjalannya, kekuatan ini bergeser ke para politisi dan kemudian ke para intelektual. Setelah kembali ke *Khittah 1926*, bukan beberapa tahun sebelumnya yang tercermin dari “Kudeta” dari sejumlah kiai sepuh terhadap Kiai Idham Chalid – Para kiai berupaya mengapai-gapai otoritas yang mulai bergeser itu. Tetapi, apapun yang dilakukan, pergeseran telah dan akan terus terjadi, dan suatu hal yang sulit terelakan.

Memperhatikan gerak langkah NU seperti itu, bolehlah dikatakan, bahwa NU memang tidak memiliki konsepsi yang tetap dan jelas tentang bentuk dan



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

aktivitas organisasinya. Lihat saja perkembangannya. NU pertama-tama menjaadi organisasi yang bergerak di bidang sosial keagamaan saja, anti kolonialisme. Namun, ketika jepang datang, setelah beberapa lama NU dapat “bekerjasama” dengan jepang. Kemudian NU bersama-sama dengan organisasi Islam lainnya mendirikan Masyumi, tetapi tidak lama kemudian ia keluar dan mendirikan partol sendiri. Mereka lantas bergabung dengan PPP dan kemudian kembali lagi ke bentuknya yang semula. Kecendrungan seperti ini disebabkan oleh pandangan NU mengenai organisasi yang dilihat semata-mata sebagai “alat”.

Dalam konteks semacam ini, “alat” bisa berkemungkinan sebagai organisasi politik. Namun apakah “alat” itu bisa dipakai untuk mengapai tujuan atau tidak bergantung pada penglihatan Elite NU yang dikaitkan pula pada pandangan terhadap konteks lingkungannya. Penglihatan itu tidak semata-mata didasari oleh pemikiran-pemikiran untung rugi, melainkan pula didasari oleh pandangan-pandangan fiqh-ah yang selama ini menjadi pedoman NU.

Kemungkinan-kemungkinan itu juga akan dipengaruhi oleh perkembangan NU, aktivitas sosial keagamaan, setelah kembali ke *Khittah 1926*. Yakni apakah aktivitas itu lebih cenderung memiliki kemaslahatan bagi warga nahdliyin dan umat Islam pada umumnya daripada ketika masih berpolitik praktis. Untuk itu, evaluasi dari waktu ke waktu akan menjadi pertimbangan sendiri. (Kacung Marijan, 1992 : 213-222). Oleh sebab itu, kemungkinan-kemungkinan yang telah diuraikan Kacung Marijan (1992 : 213-222) tentu menjadi perhatian kaum nahdliyin dan ulama-ulama yang masih berpegang teguh pada *khittah 1926*.

1. Diararag mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diararag mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

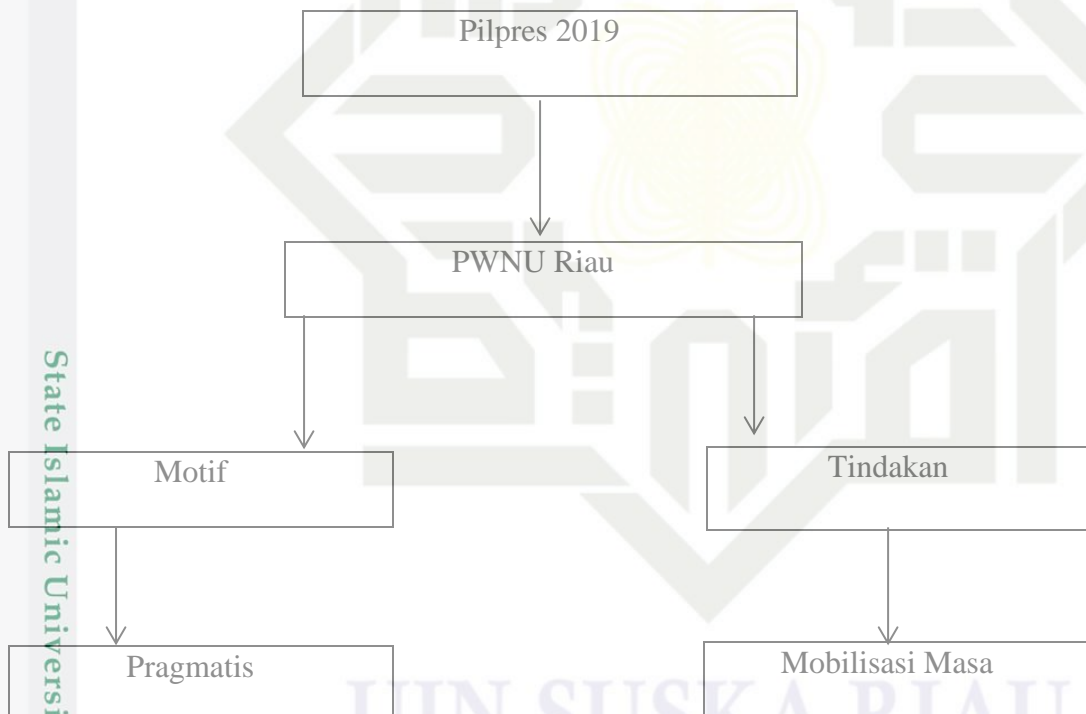
2.11 Kerangka Berpikir

Kerangka pikiran bertujuan untuk menggambarkan tentang keterkaitan antara variable penelitian dengan indikator-indikator yang mempengaruhinya, dilandasi oleh konsep maupun teori-teori yang dianggap relevan.

Setelah memahami bagaimana konsep-konsep yang berhubungan atau berkaitan dengan Politik Elite NU; Keberpihakan Dalam Pilpres Tahun 2019.

Maka Penulis menggambarkan kerangka pemikiran sebagai berikut:

Gambar 2.11 kerangka berpikir



2.12. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu yang relevan adalah penelitian yang dilakukan oleh Muhammad Masyhuri (2016) dalam journalnya yang berjudul “NU dan



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Diarangi mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Paradigma Teologi Politik Pembebasan: Refleksi Hitoris pasca *Khittah*'' Tujuan penelitiannya adalah untuk melihat peran institusi agama dalam upaya membebaskan umat dari dilemma yang dihadapinya. Kajian teologis dalam dimensi pembebasan ini selain bertujuan untuk melihat bagaimana ijtihad para ulama dalam merefleksikan doktrin keagamaan atas dilema politik yang terjadi juga melihat bagaimana bagaimana strategi yang digunakan dalam mengimplementasikan kedalam realitas politik yang dihadapi. Kajian ini bersifat historis deskriptif yang berfokus pada asfek kesejarahan dinamika politik NU, aspek kelembagaan setelah kembali ke khittah 1926, juga menganalisis dinamika tersebut dengan mengkaitkan konsep teologi pembebasan dalam islam. Hasil kajian menunjukan bahwa dinimasisasi dalam politik serta refleksinya-baik berbentuk akomodasi maupun oposisi dalam memaknai hubungan antara agama dan negara-terkait erat dengan paradigmpolitik Sunni. Meski dalam kenyataannya, memunculkan varian sosiologis politik yang beragam dalam memaknai dalam memaknai paradigm telogi Sunni tersebut. Namun secara kelembagaan, implementasi refleksi teologi pembebasan yang terlihat lebih pada bentuk substansialistik, realistic dan rasionalistik. Akar pembebasan yang terlihat lebih dalam varian ini yang lebih menekankan pada perdamaian, pluralism, kemanusiaan dan keadilan. Perubahan ini terjadi dalam dinamika sejarah NU adalah kelembagaannya institusi pendidikan, menguatnya peran dan posisi keagamaan, serta meningkatnya partisipasi masyarakatt dalam bidang sosial ekonomi dan politik tanpa terjebak pada politisasi agama secara kelembagaan.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Diarangi mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Kesimpulan dari jurnal ini. Adanya perdebatan dikalangan NU terhadap pemaknaan *Khittah 1926* yang terus berlangsung disetiap dinamisasi kelembagaannya – yang terindikasi dengan adanya beberapa varian sosiologis politik – menunjukkan adanya tarik-menarik kepentingan yang kat didasarkan pada perbedaan paradigm dalam memaknai teologi politik NU. Karena demikian. Evaluasi teologis dalam varian sosiologis politik ini perlu dilihat kembali agar konstruksi teologi politik NU dapat dirumuskan secara jelas. Disamping itu juga dapat dirunut pada level mana varian sosiologi tersebut sesuai dengan bingkai paradigm politik yang membebaskan.

Salah satu varian sosiologis politik NU yang sudah dibahas sebelumnya adalah menghendaki implementasi *Khittah 1926* dengan pemisahan secara tegas dari keterlibatannya dengann wilayah politik apapun. Di antara perilaku yang muncul dalam perilaku politik ini adalah pemaknaan doktrin idiologis politik NU secara ketat. Meskipun peran dan fungsi keagamaan pada varian ini relative aman dan membebaskan, karena konflik kepentingan yang melibatkan kelembagaan NU tidak menimbulkan bias politik, namun pilihan terkesan minimalis – di mana hal tersebut cenderung memilih sesuatu yang baik dari buruk, tidak mencoba memilih sesuatu yang baik dari yang baik. Dominasi khawatir dari sejarah politik NU pada periode 50-an hingga awal 80-an, telah memunculkan sindrom ketakutan bahwa ranah politik harus dihindari secara total. Atas dasar rasionalisasi ini, maka dinamika politik NU yang terjadi disetiap pemilu menjadi ajang perebutan bagi partai-partai politik, karena potensi masa ang dimilikinya tidak memiliki jalur yang dapat mengartkulasi



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kepentingan NU secara kelembagaan. Sebaliknya, dalam varian sosiologis politik yang merefleksikan doktrin *Khittah 1926* sebagai kemunduran bagi NU secara kelembagaan, di mana selanjutnya varian sosiologis politik ini berupaya mengembalikan NU pada ranah politik, maka yang terlihat adalah kecendrungan perilaku politik oportunistik. Hal ini bisa disadari karena tujuan keagamaan lebih ditekankan pada aspek pragmatis daripada aspek ideologis dan normative keagamaan. Di sisi lain, bertentangan dengan varian sosiologis sebelumnya – yang terkesan membebaskan agama dari politisasi agama, maka perilaku politik dalam varian ini selain memunculkan symbol-simbol keagamaan dalam mencapai tujuan politiknya, juga menimbulkan rentannya korupsi pada peran dan fungsi dari agama.

Sementara dalam varian sosiologis politik yang mengabungkan kedua paradigam diatas, secara historis dinamika politik NU cenderung ambivalen – yang masih terlihat tidak memberikan batasan ketegasan posisi. Hal ini dapat dilihat dari realitas dinamika politik yang terjadi, di mana pemisahan secara structural terhadap dimensi politik tidak memberikan jaminan bagi NU secara kelembagaan terbebas dari bias politik. Sehingga, fenomena ini terkesan temporal – yang berlaku di saat yang lain cenderung berbeda, tergantung sejauh mana subjek politik memengaruhi dan mendominasi varian sosiologis politik dalam varian ini. Selain masih rentan terhadap munculnya perdebatan terhadap batasan pemaknaan teologis di antara ketiga wilayah varian sosiologis politik ini – di mana pada varian sosiologis politik ini cenderung untuk saling melakukan dominasi, pada level kepemimpinan dalam tradisi NU yang figuristik, juga



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Diarangi mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

memunculkan problem terhadap perilaku politik dalam masyarakat NU. Kesadaran untuk menentukan sikap politik secara bebas nampak pupus ketika budaya patronase yang dimunculkan oleh tokoh sentral NU dalam penggunaan fatwa-fatwa politik menjelang pemilu. Meskipun fenomena ini terlihat pada varian sosiologis politik yang tidak menghendaki *Khittah* tanpa politik, namun pada varian lainnya, pengaruh budaya kepemimpinan ini tidak bisa dibendung di lapisan masyarakat bawah.

Berdasarkan fenomena dari ketiga varian diatas, dimensi pembebasan nampak terlihat pada varian sosiologis politik yang mendasarkan pada *Khittah* 1926 dengan menandakan pemisahan secara jelas di level kelembagaan dari politik praksis, namun disisi yang lain, juga muncul dalam varian sosiologis politik yang selain mendasarkan pada *Khittah* 1926 namun tetap menghendaki adanya deal-deal politik yang secara historis didasarkan pada perlunya pertimbangan pragmatis.

Meskipun demikian sisi negative dan positif dari keduanya bisa terlihat dimana pemisahan tersebut menjamin pembebasan agama dari kontramisasi politik. Atas dasar pertimbangan ini, maka yang perlu dilakukan NU pada tataran teologis adalah meminimalisir bias politik pada kelembagaan NU. Ekspansi dimensi pragmatis pada level ideologis dan normative akan memunculkan penggunaan infra dan supra struktur kelembagaan NU - baik pada aspek kepemimpinan dan program kelembagaan – untuk tujuan politik. Meskipun demikian, upaya meminimalisir bias politik pada tataran teologis ini tidak dapat terealisasi tanpa adanya kebijakan praktis pada level kelembagaan,



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

terutama pada varian sosiologis yang menghendaki selain berpijak pada *Khittah* juga kerap melakukan kesepakatan-kesepakatan politik. Oleh karenanya dalam varian sosiologis politik ini, jalur politik yang telah ditentukan oleh kelembagaan NU, harus tetap dalam koridor partai, bukan melalui NU secara kelembagaan. Berdasarkan pemaknaan seperti ini, peran dan fungsi keagamaan yang menekankan pada nilai dan etika dalam politik akan tetap terjaga, dan relative aman sari kontaminasi kepentingan politik praktis yang secara historis lebih merugikan.

Penelitian lain juga telah dilakukan Firdaus Muhammad (2015) dalam journalnya yang berjudul “Dinamika Pemikiran dan Gerakan Politik Nahdlatul Ulama”. Bertujuan untuk menyoroti dinamika politik Nahdlatul Ulama dalam perspektif sosiologis, historis, dan antropologis. Berdasarkan kenyataan yang ada, dinamika politik NU nampaknya telah merambah pada berbagai aspek, meliputi aspek keagamaan, politik, dan budaya. NU pernah terlibat dalam dunia politik. Organisasi ini pernah juga menyatakan keluar dari dunia politik Kemampuan NU dalam beradaptasi dengan perkembangan dan tuntutan zaman telah membuat organisasi ini tetap eksis di tengah arus perubahan politik masyarakat dan menjadi suatu organisasi keagamaan terbesar di Indonesia.

Kesimpulannya adalah proses transformasi gerakan politik keagamaan NU secara keseluruhan tidak terlepas dari bentangan sejarahnya yang cukup panjang lebih dari 70 tahun. Secara periodik dibagi ke dalam tiga periode yakni: pertama, periode kiai dan pesantren (1926-1952), kedua periode Kiai-Politisi (1952-1984) dan ketiga Periode kiai-intelektual (1984-sekarang). Pembagian tiga



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

periode tersebut tidak dapat dipahami secara kaku, tetapi harus dilihat secara proporsional sesuai dinamika perjalanan politik NU sejak berdiri hingga sekarang sesuai dengan *setting politik* yang melahirkan kontekstualisasi gerakan yang fleksibel.

Dalam Journal “Transformasi NU di Indonesia : Upaya Menghilangkan Pemik di tengah Perubahan Politik” oleh Hartati dan Hambali (2018). Tujuannya adalah untuk membahas aktor-aktor kekuasaan dan elit politik, yang selalu memiliki posisi, strategis, dan nominasi dalam perjalanan sejarah bangsa, yang sering memiliki kekuatan untuk mengarahkan dan merancang sejarah bangsa. Munculnya wacana modernis mengenai Nahdlatul Ulama (NU) sangatlah miris. NU dianggap sebagai organisasi politik tidak mempunyai peran yang signifikan untuk turut mengatur perubahan politik dan pergantian aktor-aktor kekuasaan dan elit politik secara langsung.

Hal ini dikarenakan ranah berfikir yang sering menjadi konservatif, ketungtungan, percaya takhyul, berfikir kuno, oportunis, berwatak bunglon dan p-p-plan, korup, berbudaya sinkretis, dan lainnya. Secara internal NU seperti mengalami „stagnasi pemikiran“.

Pada saat yang sama, belum menemukan visi terkait bagaimana peran dan kontribusi NU terhadap Indonesia dalam konteks percaturan global. Nu sebagai organisasi yang memiliki generasi millennial berlimpah, tentu memiliki peran sangat strategis dalam upaya mewujudkan Indonesia emas 2045. Diperlukan ikhtiar untuk menggali hal-hal dalam tradisi yang bisa mendukung transformasi. NU harus mampu mengkonsentrasikan diri untuk mengurus persoalan-persolan



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

umat di bidang sosial, masyarakat, pendidikan, kesehatan, pemberdayaan, ekonomi, keagamaan, politik dan sebagainya, yang mungkin lebih fundamental bagi bangsa Indonesia.

Kesimpulannya, Nahdltaul Ulama sebagai organisasi Islam tradisional menunjukkan bahwa pribumisasi Islam memiliki urgensi terhadap dinamika sosial-kemasyarakatan. Mengadopsi apa yang layak dalam tradisi untuk dikembangkan demi kepentingan masa kini dan masa depan merupakan langkah pemaknaan yang paradigmatis. Karena sebuah transformasi, baik pemikiran maupun sosial, harus beranjak dan menimba inspirasinya dari tradisi. Maka, diperlukan ikhtiar untuk menggali hal-hal dalam tradisi yang bisa mendukung transformasi. Baik dalam bidang ekonomi, sosial masyarakat, ekonomi dan politik.

Upaya dari visi dan misi ini adalah untuk memperkuat dan mewujudkan jamiyyah Aswaja bagi umat masyarakat yang mandiri, demokrasi, adil dan sejahtera di tengahnya kehidupan wadah negara Kesatuan Republik Indonesia yang berasaskan Pancasila. Betapapun NU lahir dan berdiri sebagai organisasi keagamaan. Namun yaitu integritas terhadap bangsa, independensi dari kolonialisme, dan hak untuk berkeyakinan. Peduli terhadap persoalan kebangsaan, kritis terhadap kekuasaan dan menjaga hak warga negara untuk tidak mengganggu keberagama dan berkeyakinan.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Diarangi mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2.13. Definisi konsep

Konsep adalah istilah atau definisi yang digunakan untuk menggambarkan secara abstrak kejadian, keadaan, kelompok dan individu yang menjadi pusat perhatian ilmu sosial (Masri Sangarimbun, 1989: 3). Definisi konsep dimaksudkan untuk menghindari interpretasi ganda dari variable yang diteliti atau mendapatkan bahasa yang jelas dari masing-masing konsep yang akan diteliti. Di dalam penelitian ini, penulis memakai beberapa definisi. Untuk menghindari kesalahpahaman, maka penulis menjelaskan beberapa definisi yang terdapat dalam tulisan ini. Adapun yang menjadi definisi konsep dalam penelitian ini adalah :

- Politik adalah sebuah tahapan untuk membentuk atau membangun posisi-posisi kekuasaan didalam masyarakat yang berguna sebagai pengambil keputusan-keputusan yang terkait dengan kondisi masyarakat. Atau tindakan dari suatu kelompok individu mengenal suatu masalah dari masyarakat atau negara.
- Elite adalah mereka yang menduduki posisi komando pada pranata-pranata utama dalam masyarakat. Dengan kedudukan tersebut para elite mengambil keputusan yang membawa akibat yang dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat.
- Nahdlatul Ulama (NU) adalah organisasi keagamaan dan kemasyarakatan yang eksistensinya memainkan peran penting bagi kehidupan bangsa yang bermotif keagamaan dan berlandaskan keagamaan, sehingga segala sikap, perilaku, dan karakteristik perjuangannya selalu disesuaikan dan diukur



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dengan norma dan ajaran agama Islam Ahlussunnah Wal Jama'ah, serta bercita-cita keagamaan yakni *Izzul Islam Wal Muslimin* atau dengan kata lain tercapainya *sa'adatud darain* bagi umat danarganya.

- d. Pemilihan Presiden (Pilpres) adalah pemilihan umum untuk memilih presiden dan wakil presiden dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

2.14. Indikator Penelitian

Konsep	Indikator	Sub Indikator
Politik Elite NU; Keberpihakan Dalam Pilpres Tahun 2019	1. Motif	1. Pragmatis 2. Akomodatif 3. Kritis
	2. Tindakan	1. Rekomendasi Penentuan Calon 2. Kampanye 3. Mobilisasi Masa

Sumber: Teori Daniel S. Lev dalam buku Nashir Tahun 2000



BAB III

METODE PENELITIAN

1. Lokasi dan Waktu Penelitian

1.1. Lokasi

Penelitian ini dilaksanakan di PWNU Riau karena dalam penelitian ini peneliti mengambil beberapa subjek penelitian yang sesuai dengan permasalahan yang akan diteliti di PWNU Riau. Penelitian ini dilakukan di bulan Desember 2019.

3.2.2. Waktu

Waktu yang penulis angkat dalam penulisan ini adalah waktu dari sejarah ini muncul, pemikiran NU terkait politik muncul pada pemilihan pilpres tahun 2019. Karena lebih spesifik pemikiran ini di pakai guna memberikan pandangan terhadap kontestasi politik pilpres 2019. Karena ini adalah penelitian pustaka maka waktu adalah waktu sejarah dari pemikiran ini muncul dan berkembang sampai pemikirin NU ini diterapkan.

Waktu adalah seluruh rangkaian yang telah berlalu, sekarang, dan yang akan datang. (M. Quraish Shihab : 2010). Waktu merupakan suatu periode atau masa terjadinya suatu kisah perjalanan kehidupan manusia. Waktu terbagi dalam tiga kelompok yakni masa lalu, masa sekarang, dan masa depan. Pendek kata, waktu adalah suatu proses perjalanan dalam sebuah garis waktu, yang dimulai dari zaman dulu, zaman sekarang, dan zaman yang akan datang.



2. Jenis Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk melihat Politik Elite NU; Keberpihakan dalam Pilpres Tahun 2019. Bentuk penelitian ini adalah penelitian kualitatif-deskriptif, Penelitian kualitatif dilakukan untuk mendeskripsikan sebuah fenomena tertentu dengan bentuk kata-kata berdasarkan teknik pengumpulan data dan analisis data yang relevan. (Djama'an Satori, 2014: 25).

Sedangkan deskriptif merupakan prosedur atau cara memecahkan masalah penelitian dengan memaparkan keadaan obyek yang diteliti sebagaimana adanya berdasarkan fakta-fakta. (Hadari Nawawi, 1992: 2) Penelitian kualitatif-deskriptif dilakukan dengan mengakumulasi data-data yang diperoleh dari media maupun kepustakaan, kemudian data tersebut digunakan untuk menggambarkan fenomena fragmentasi dan faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya fragmentasi antar NU dalam keberpihakan pilpres tahun 2019. Pada tahapan analisis, peneliti dapat menerangkan fenomena fragmentasi dengan mengungkap faktor-faktor dengan kasus yang terjadi.

3.3. Jenis Pengumpulan Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini terdiri dari dua jenis data yaitu data primer dan skunder. Data primer dalam penelitian kualitatif adalah kata-kata dan tindakan, selebihnya merupakan data tambahan atau data sekunder yang meliputi dokumen dan lain-lain. (Lexy J. Moleong, 2014:157)

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta ini milik UIN Suska Riau

3.1. Data primer

Data Primer yang dimaksud dalam penelitian ini adalah pemikiran dan pandangan-pandangan yang pernah disampaikan oleh individu-individu kiai atau ustadz di media massa, hasil wawancara atau kesaksian baik secara lisan atau tulisan.

3.2. Data sekunder

Data sekunder yang dimaksud berasal dari data historis yang faktual berupa laporan di media massa, dokumen, buku dan referensi pustaka yang lain yang dapat digunakan untuk memahami, membandingkan serta mempertajam analisis.

3.4. Teknik Pengumpulan Data

Adapun teknik pengumpulan data yang paling memungkinkan untuk melakukan sistimatisasi dalam melakukan analisis terhadap studi kasus (*case study*) yang sudah terjadi, menurut Robert K. Yin meliputi; Dokumen-dokumen, Arsip dokumen, wawancara, pengamatan langsung, partisipan-observasi. (Robert K. Yin, 1995:103) Kemudian untuk mempermudah melakukan analisis, penulis mengelompokkan menjadi dua bagian:

a. Kajian pustaka (*library research*). Kajian pustaka yang dimaksud dalam penelitian ini adalah mengumpulkan berbagai informasi yang berkaitan dengan tema kajian yang hendak diteliti baik berupa buku, opini atau informasi media massa baik cetak atau online, atau dokumen-dokumen resmi. Dengan demikian semua referensi tersebut dalam rangka untuk



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

memperkaya kajian sebagai bahan analisis data dan kajian teoritis yang lebih mendalam.

b. Wawancara mendalam (*in-depth interview*). Wawancara adalah sumber informasi yang paling penting untuk menggali informasi tentang tema penelitian atau verifikasi data yang dipublikasikan di media massa atau dari informan yang berbeda perspektif. Penulis menggunakan teknik wawancara tidak terstruktur (*unstructured interview*) yaitu pedoman wawancara yang hanya memuat garis besar yang akan ditanyakan, (Suharsimi Arikunto, 1996:229) atau melalui teknik wawancara secara informal dan terbuka, (Lexy J. Moleong, 2014: 13) Teknik wawancara ini dilakukan untuk mengungkap pandangan dan pendapat atau klarifikasi dari sebuah hipotesis awal, atau dengan kata lain wawancara ini sebagai diskusi antara penulis dan informasi untuk mengetahui jawaban dari masalah inti penelitian secara mendalam.

c. Dokumentasi adalah salah satu metode pengumpulan data yang digunakan untuk menelusuri data historis. Dengan demikian, pada penelitian ini, maka dokumentasi memegang peranan yang amat penting (Burhan Bungin, 2001: 153). Dalam penelitian ini, metode dokumentasi yang dilakukan adalah pencarian dan pengumpulan sumber-sumber yang berkaitan dengan “Politik Elite NU; Keberpihakan Dalam Pilpres Tahun 2019”. Selain itu, bentuk dokumentasi lainnya yaitu dokumen berupa artikel-artikel online atau file yang penulis peroleh untuk menambah referensi dalam penelitian, maupun kekayaan intelektual dari penelitian ini sendiri. Dokumen-dokumen yang dimaksud adalah lampiran tentang kedudukan Nahdlatul Ulama sebagai



Hak Cipta Dilindungi Undang-undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

organisasi keagamaan dan kemesyarakatan, dan lampiran tentang bagaimana terjadi keberpihakan NU dalam pilpres tahun 2019 serta hasil wawancara peneliti kepada para informan.

5. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data menurut Miles and Huberman terdiri dari: reduksi data (*data reduction*), penyajian data (*data display*), dan pengambilan kesimpulan (*conclusion drawing*). (Aan Komariah, 2014: 218) Adapun tahapan-tahapan analisis data yang akan dilakukan penulis setelah mengumpulkan data-data baik dari dokumen, referensi buku, wawancara, maupun foto-foto, dikelompokkan berdasarkan bentuk, kategori dan uraian dasar yang mudah dipahami, maka tahap pertama, mereduksi data (*data reduction*), berarti penulis merangkum, memilih hal-hal yang penting, mencari tema dan polanya serta membuang hal-hal yang tidak penting.

Dengan demikian data yang direduksi akan memberikan gambaran tentang tema pokok dalam penelitian ini yaitu wacana politik kiai atau ustadz atau fragmentasi politik kiai atau ustadz. Kedua, penyajian data (*data display*) dalam bentuk deskriptif dan naratif dengan berusaha menginterpretasi data dengan teoritisasi yang dipakai dalam penelitian ini. Dalam tahapan ini, sebuah analisis akan menjelaskan dan menggambarkan faktor fragmentasi politik yang terjadi di kalangan kiai atau ustadz. Ketiga, pengambilan kesimpulan (*conclusion drawing*) pada tahap ini penulis melakukan kesimpulan dari hasil analisis data untuk menjawab rumusan masalah yang diajukan diawal penelitian.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3.6. Informan Penelitian

Informan ini merupakan elite informan PWNU Riau, terdiri dari:

Tabel 3.6. Informan Penelitian

No	Nama	Jabatan	Jumlah
1	K.H. Hajar Hasan	Rais Syuriah PWNU Riau	5
2	Rifqi Pahlevi	Sekretaris LPNU Riau	
3	Nurhadi, SE, MM	Akademisi	
4	Ust. Suhudi, S.Pd	Tokoh NU Riau	
5	Tribowo	Simpatisan NU	

Sumber: Data Olahan Tahun 2019



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB IV

GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

4.1 Sejarah Lahirnya Nahdlatul Ulama

Banyaknya perbedaan ideologis dan perbedaan pandangan dalam merespon fenomena yang ada, baik dalam skala nasional dan internasional khususnya dunia Islam maka pada tanggal 16 rajab 1344 H atau 31 Januari 1926 di Surabaya (Mahmud Yunus, 1996: 239).

Lahirnya Nahdlatul Ulama sebagai representatif dari kaum tradisional, yang merupakan jawaban dari umat Islam terhadap problem dan fenomena yang berkembang dalam dunia Islam di Indonesia dan untuk berkiprah dalam memperkuat barisan kebangkitan nasional. Nahdlatul Ulama" berasal dari bahasa arab (Mahmud Yunus, 1973: 278-471).

Nahdlatul artinya bangkit atau bergerak. Nama Nahdlatul Ulama" adalah usulan dari Ulama"-ulama" pada zaman dahulu. Nahdlatul Ulama" sebagai organisasi masyarakat dan keagamaan yang mempunyai lambaga yang menggambarkan dasar tujuan dan cita-cita dari keberadaan organisasi (Masykur Hasyim, 2002: 65).

Nahdlatul Ulama lahir pada tanggal 31 Januari 1926 sebagai representatif dari ulama tradisional, dengan haluan ideologi ahlus sunnah dan jamaah tokoh-tokoh yang ikut berperan diantaranya K.H. Hasyim Asy"ari. K.H. Wahab Hasbullah dan para ulama pada masa itu pada saat kegiatan reformasi mulai berkembang luas, ulama belum begitu terorganisasi namun mereka sudah saling mempunyai hubungan yang sangat kuat. Perayaan pesta



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

seperti haul, ulang tahun wafatnya seorang kiai, secara berkala mengumpulkan para kiai, masyarakat sekitar ataupun para bekas murid pesantren mereka yang kini tersebar luas diseluruh nusantara (Masykur Hasyim, 2002: 65).

Nahdlatul Ulama mulanya hanya sebuah kepanitiaan yang disebut Komite Merebuk Hijaz, namun atas beberapa inisiatif kalangan ulama waktu itu, telah menempatkan K.H. Hasyim Asy'ari sebagai tokoh pendiri dan langsung mengetuainya. (Abdul Sani, 1998: 216).

Selain itu, ada alim ulama lain dari tiap-tiap daerah di Jawa Timur. Diantaranya adalah: K.H. Hasyim Asy'ari Tebuireng, K.H. Abdul Wahab Hasbullah, K.H. Bisri Jombang, K.H. Ridwan Semarang, K.H. Nawawi Pasuruan, K.H.R. Asnawi Kudus, K.H.R Hambali Kudus, K. Nakhrawi Malang, K.H.Doromuntaha Bangkalan, K.H.M. Alwi Abdul Aziz. (Zuhairini, 2013: 178).

Kelahiran Nahdlatul Ulama merupakan respons terhadap munculnya gagasan pembaharuan Islam di Indonesia yang banyak di pengaruhi pemikiran atau faham Wahabi serta ide-ide pembaharuan Jamaluddin Al-Afgani dan Muhammad Abduh. Gerakan pembaharuan Islam di Indonesia, khususnya di Pulau Jawa, dipelopori oleh KH. Ahmad Dahlan yang kemudian pada 1912 membentuk organisasi Muhammadiyah yang banyak melakukan kritik terhadap praktik-praktik keagamaan yang dilakukan kelompok muslim tradisional, seperti menolak tarikat atau praktik seperti talqin yang berkembang sebagai tradisi keagamaan muslim tradisional.

Kelahiran Nahdlatul Ulama (NU) pada 1926 silam sebenarnya tak bisa dipisahkan dengan perkembangan kelompok Islam yang secara relatif berhaluan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengummumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pembaruan ke arah “yang disebut” pemurnian (purifikasi) ajaran Islam. Organisasi Muhammadiyah didirikan di Yogyakarta pada 1912 oleh KH Ahmad Dahlan yang kemudian gerakannya dianggap cenderung berbeda dengan kebiasaan praktik-praktik keagamaan (Islam) masyarakat lokal merupakan bagian dari efek picu (trigger effect) yang mempercepat lahirnya NU. Ditambah lagi pada saat itu gerakan pembaruan Islam di Timur Tengah di bawah pengaruh kuat ajaran Muhammad bin Abdul Wahab (Wahabi) dianggap sudah kebablasan karena sudah sampai pada keinginan membongkar makam Rasulullah SAW. Kalangan ulama Indonesia berhaluan Sunni akhirnya membentuk komite (yang disebut Komite Hijaz) yang selanjutnya diutus khusus untuk menemui Raja Fahd di Arab Saudi (Hartono Margono, *Jurnal KH. Hasyim Asyari dan Nahdlatul Ulama :Perkembangan Awal dan Kontemporer*, (Media Akademika, Vol. 26, No. 3, Juli 2011), hal. 339-340)

Berdirinya Nahdlatul Ulama tak bisa dilepaskan dengan upaya mempertahankan ajaran ahlus sunnah wal jamaah (aswaja). Aswaja merupakan paham keagamaan NU, bagi NU aswaja merupakan jiwa dan haluan organisasi paham keagamaan dalam menentukan pola, sikap, pikiran, perilaku dan pemerintahan (Ali Masykur Musa, 2011: 30)

Ajaran ini bersumber dari Alquran, Sunnah, Ijma“(keputusan-keputusan para ulama“sebelumnya). Dan Qiyas (kasus-kasus yang ada dalam cerita Alquran dan Hadits) seperti yang dikutip oleh Marijan dari K.H. Mustofa Bisri ada tiga substansi, yaitu:



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Dalam bidang-bidang hukum-hukum Islam menganut salah satu ajaran dari empat madzhab (Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hanbali), yang dalam praktiknya para Kyai NU menganut kuat madzhab Syafi'i.
2. Dalam soal tauhid (ketuhanan), menganut ajaran Imam Abu Hasan Al-Asy'ari dan Imam Abu Mansur Al-Maturidi.
3. Dalam bidang tasawuf, menganut dasar-dasar ajaran Imam Abu Qosim Al- Junaidi. Proses konsolidasi faham Sunni berjalan secara evolutif. Pemikiran Sunni dalam bidang teologi bersikap elektik, yaitu memilih salah satu pendapat yang benar (PWNU Yogyakarta, *Ke-NU-an Ahlu-sunnah Wal Jama'ah Annahdliyah*, (Yogyakarta: LP Ma'arif NU, 2017), hal. 4-5).

Hasan Al-Bashri (w. 110 H/728) seorang tokoh Sunni yang terkemuka dalam masalah Qada dan Qadar yang menyangkut soal manusia, memilih pendapat Qodariyah, sedangkan dalam masalah pelaku dosa besar memilih pendapat Muja'ah yang menyatakan bahwa sang pelaku menjadi kafir, hanya imannya yang masih (fasiq). Pemikiran yang dikembangkan oleh Hasan AL-Basri inilah yang sebenarnya kemudian direduksi sebagai pemikiran Ahlus sunnah waljama'ah (Laode Ida, 2004:7)

Nahdlatul Ulama (NU) sejak kelahirannya merupakan wadah perjuangan untuk menentang segala bentuk penjajahan dan merebut kemerdekaan negara Republik Indonesia dari penjajah Belanda dan Jepang, sekaligus aktif melakukan dakwah-dakwahnya untuk senantiasa menjaga kesatuan negara Republik Indonesia dalam wadah NKRI. NU sejak dahulu sampai sekarang dan sampai



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kapapun akan senantiasa berjuang demi kepentingan umat. Dalam perjuangannya NU masuk ke dalam berbagai segi, di antaranya adalah melalui politik kebangsaan, pemberdayaan ekonomi, dan peningkatan sumber daya manusia. (LP Ma'arif NU, *Ke-NU-an Ahlussunah Wal Jama'ah Annahdliyah*, (Yogyakarta: Lembaga Pendidikan Ma'arif Nahdlatul Ulama, 2017), hal. 96.)

Bagaimana NU dalam peranannya yang begitu besar dalam memperjuangkan kemerdekaan Indonesia, mempertahankan keutuhan NKRI dapat dilihat atas latar belakang lahirnya ormas terbesar di dunia Nahdlatul Ulama (NU). Paling tidak ada tiga alasan besar yang melatarbelakangi lahirnya Nahdlatul Ulama 31 Januari 1926, yaitu Pertama, motif agama. Kedua, motif mempertahankan paham Ahlu al-Sunnah wa 'l-Jamā'ah, dan ketiga, motif nasionalisme. (Amin Farih, *Jurnal Nahdlatul Ulama dan Kontribusinya Dalam Memperjuangkan Kemerdekaan dan Mempertahankan NKRI*, (Volume 24, Nomor 2, November 2016), hal. 252)

Motif nasionalisme timbul karena NU lahir dengan niatan kuat untuk menyatukan para ulama dan tokoh-tokoh agama dalam melawan penjajahan. Semangat nasionalisme itu pun terlihat juga dari nama Nahdlatul Ulama itu sendiri yakni "Kebangkitan Para Ulama" (Zudi Setiawan, 2007: 76) NU pimpinan Hadratus Syaikh KH. Hasyim Asy'ari sangat nasionalis. Sebelum RI merdeka, para pemuda di berbagai daerah mendirikan organisasi bersifat kedaerahan, seperti Jong Celebes, Pemuda Betawi, Jong Java, Jong Ambon, Jong Sumatera, dan sebagainya, akan tetapi kiai-kiai NU justru mendirikan organisasi pemuda bersifat nasionalis.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pada tahun 1924 para pemuda pesantren mendirikan Shubban al-Waṭān (Pemuda Tanah Air). Organisasi pemuda itu kemudian menjadi Ansor Nahdlatol Ulama (ANO) yang salah satu tokohnya adalah Kiai Muhammad Yusuf Hasyim. Selain itu dari rahim Nahdlatul Ulama (NU) lahir laskar-laskar perjuangan fisik, di kalangan pemuda muncul laskar-laskar Hizbullah (Tentara Allah) dengan penglipmnya KH. Zainul Arifin seorang pemuda kelahiran Barus Sumatera Utara tahun 1909, dan di kalangan orang tua Sabīlillāh (Jalan menuju Allah) yang di komandoi KH. Masykur, laskar-laskar NU di atas siap berjuang jihad menegakkan agama dan bangsa, mengusir para penjajah Belanda dan Jepang untuk merebut kemerdekaan negara kesatuan Republik Indonesia (Amin Farih, *Jurnal Nahdlatul Ulama dan Kontribusinya Dalam Memperjuangkan Kemerdekaan dan Mempertahankan NKRI*, (Volume 24, Nomor 2, November 2016), hal. 253).

Perjuangan yang dilakukan oleh Nahdlatul Ulama (NU) dengan upaya yang kuat menggerakkan para ulama, santri dan umatnya untuk bangkit menghimpun kekuatan melawan pemerintahan asing yang dianggap kafir, merupakan bukti sejarah yang tidak dapat dipungkiri. Bahkan menurut hitungan rasional kemerdekaan negara Indonesia ini tidak akan pernah terwujud, mengingat rakyat Indonesia pada saat itu merupakan rakyat yang miskin, serba kekurangan, untuk mereka saja masih sulit akibat kejamnya penjajahan, demikian juga minimnya persenjataan yang dimiliki oleh pasukan dan relawan pejuang rakyat kita, apabila dibandingkan dengan persenjataan yang dimiliki oleh penjajah Belanda (A. Hammy Faishal Zaini, 2018: 74-75).



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Akan tetapi berkat motivasi para ulama kita termasuknya adalah ulama NU yang berupaya mentransformasi gerakan-gerakan yang bersifat spontanitas kepada mekanik atau organik dari doa dan wirid-wirid yang diberikan oleh ulama-ulama NU (bisa berupa asma', hizb, dhikir, salawat dan lain sebagainya) menjadi sebuah sugesti besar pensakralan dan kekuatan besar untuk melawan peperangan melawan penjajah, maka dengan sugesti yang kuat ini perjuangan para ulama bisa menghantarkan ke sebuah kemerdekaan berkat rahmat Allah (Amin Farih, *Jurnal Nahdlatul Ulama dan Kontribusinya Dalam Memperjuangkan Kemerdekaan dan Mempertahankan NKRI*,...hal. 254).

Jika dahulu salah satu factor pendorong lahirnya Nahdlatul Ulama adalah untuk menghadapi globalisasi wahabi maka sekarang ini tantangan yang dihadapi NU lebih kompleks karena NU dikepung oleh berbagai kelompok Islam berjenis lain yang meski secara masa tidak terlalu besar, tetapi berpotensi menarik kelompok-kelompok baru (Nur Kholik Ridwan, 2008: 3).

Nahdlatul Ulama (NU) pra kemerdekaan tampil sebagai organisasi yang digegani oleh penjajah. Sehingga kekuatan Ulama yang tergabung dalam Nahdlatul Ulama (NU) mampu menjembati kepentingan Islam dan juga kepentingan bangsa Indonesia yang menjadi pilar pengantar terhadap lahirnya negara kesatuan republik Indonesia. Menurut seorang bekas murid pesantren Kyai Hasyim Asyari di Tebuireng, para santri menyanyikan lagu kebangsaan tiap hari Kamis, setelah pengajian selesai (Andree Feillard, 2017: 14-15) ini artinya para ulama sejak zaman dulu sudah menanamkan kepada para santrinya nilai-nilai nasionalisme.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Meskipun tidak melibatkan diri secara langsung dalam dunia politik, para pimpinan NU memperhatikan juga bentuk Negara Indonesia yang akan datang. Pada muktamar XV yang berlangsung bulan juni 1940 (muktamar terakhir masa pemerintahan colonial belanda) NU mengadakan rapat tertutup yang dihadiri oleh sebelas ulama di bawah pimpinan KH. Mahfudz Shiddiq membicarakan calon yang pantas untuk dijadikan presiden pertama Indonesia mendatang. Sebelas tokoh NU menentukan pilihan di antara dua nama yang disebut pada rapat tertutup itu adalah soekarno dan Muhammad Hatta. Para ulama memilih Soekarno dengan suara 1 berbanding 10 (Andree Feillard, 2017: 14-15).

Keputusan ini perlu mendapatkan perhatian khusus karena diambil pada saat berlangsungnya perdebatan seru mengenai Indonesia akan dijadikan Negara Islam atau bukan. Di samping itu Muhammad Hatta yang berasal dari Sumatra Barat memiliki citra lebih “santri” dibanding Soekarno, orang Jawa Timur yang mulai memperdalam pengetahuannya sewaktu berada dipengasingan, yang menyatakan jelas kekagumannya kepada Kemal Attaruk.

Sejak September 1945, pasukan Inggris mendarat di Jawa, mewakili sekutunya, Belanda yang berusaha menanamkan kembali kekuasaannya di Hindia Belanda. Jakarta, Bandung dan Semarang telah jatuh ketangan mereka dan kedatangan pasukan Inggris ditunggu di Surabaya. Menghadapi ancaman ini, para ulama NU berkumpul pada tanggal 22 oktober 1945 dan menyatakan Perang Jihad (*Djihad fi Sabilillah*) melawan sekutu Inggris-Belanda.

Pesantren-pesantren sering dijadikan tempat berlindung dan berkumpul pasukan *Hizbullah* dan pasukan *Sabillah* (Andree Feillard, 2017: 37). NU sejak



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dari dulu selalu berjuang untuk kemerdekaan NKRI dari tangan penjajah kolonial Belanda. Keterlibatan fisik dan moral para ulama, santri dan kiyai “sakti”, yang harus memimpin pasukan atau memberikan kekuatan moral untuk mencapai kemenangan, tercantum dalam Resolusi Jihad NU (Gunaji, 2009: 13).

Mulai 1946, NU secara penuh mengambil bagian dalam pemerintahan dengan diberikannya jabatan menteri Agama yang dibentuk pada tahun 3 Januari 1946 (Menteri Agama pertama adalah H.M. Rasyidi, yang digantikan beberapa bulan kemudian oleh seorang menteri dari NU, atas permintaan dari kaum tradisonalis) Departemen Agama ini baru dibentuk beberapa waktu sesudah kemerdekaan, selain itu dibentuknya Departemen Agama juga akan menyebabkan terjadinya sentralisasi lembaga-lembaga Islam. Bagi Nahdlatul Ulama amanah ini merupakan kunci yang membuatnya berada pada posisi yang sangat menguntungkan jangka panjang karena memberikan landasan yang sah bagi aktivitas social keagamaanya. Kemudian diangkatlah KH. Wahid Hasyim untuk menjadi Menteri Agama RI dari tokoh Nahdlatul Ulama.

Keterlibatan NU dalam dunia politik semakin terlihat ketika NU bergabung dalam Masyumi sebagai partai politik. Namun kedudukan NU dalam kepengurusan Masyumi tidak terwakili di badan eksekutif dan hanya menduduki dewan syuro yang tidak banyak menentukan terhadap kebijakan partai bahkan sampai akhirnya dewan syuro diturunkan, kedudukannya hanya menjadi penasihat partai. Keretakan tubuh Masyumi akibat berbagai polemik membuat NU memutuskan untuk keluar dari Masyumi pada tahun 1952. Setelah keluar dari Masyumi, NU secara institusi telah siap berubah 39 orientasi visi dan misi jika



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

semula NU sebagai organisasi keagamaan maka sekarang menjadi organisasi politik. (Titik Triwulan Tutik dan Joenaedi Efendi, 2008: 42-43).

Pemilu pertama yang diikuti NU setelah resmi menjadi partai politik adalah pada tahun 1955. Hasil yang cukup memuaskan yaitu NU berada pada posisi ketiga dibawah PNI dan Masyumi. Meskipun NU merupakan partai baru namun mengingat NU merupakan suatu organisasi yang mempunyai massa yang cukup banyak, tidak heran jika NU mampu menjadi tiga besar saat pemilu 1955. Ketika Soekarno memberlakukan Demokrasi Terpimpinnya, hingga muncul slogan NASAKOM, membuat posisi NU sangat dilematis. Di satu sisi NU mempunyai kedudukan yang dekat dengan Soekarno namun disisi lain NU sangat membenci PKI (Andree Feillard, 2017: 95).

Sikap tegas NU pun diambil, ia lebih mementingkan kemaslahatan umat dan oleh karena itu ia akan ikut berperan aktif dalam penumpasan PKI. NU sejak lama telah curiga dan membenci PKI, kebencian NU semakin menjadi ketika PKI melancarkan gerakan yang dikenal dengan “Aksi Sepihak”. Kader-kader PKI terutama aktivis-aktivis organisasi tani BTI (Barisan Tani Indonesia) secara sepihak memaksa pembagian tanah dan hasil pertanian kepada petani-petani di berbagai desa khususnya di pulau Jawa. NU kemudian melakukan konsolidasi antara matang dan barisan NU (Abdul Mun'im Dz, 2014: 55).

Yang terdiri dari Pertanu, Lesbumi, Sarbumusi, Fatayat, Muslimat, IPNU, IAINU, PMII dan khususnya Pemuda Anshor dan Banser telah siap menghadapi kemungkinan terburuk dari aksi sepihak PKI tersebut. NU melalui Pemuda Anshor dan massa NU lainnya berhasil mematahkan aksi sepihak tersebut



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

di berbagai wilayah seperti Banyuwangi, Kediri, Blitar, Mantingan, Pemalang, Indramayu dan daerah lainnya. (Andree Feillard, 2017: 95).

Sejarah mencatat peranan NU dalam sejarah kemerdekaan bangsa Indonesia tidak diragukan lagi, puncaknya dalam membentuk pondasi negara Indonesia, Kh. Wahid Hasyim di utus oleh ayahnya Kh. Hasyim Asy'ari dalam perumusan konstitusi dan fondasi dasar Negara Indonesia pada masa awal kemerdekaan NKRI bersama dengan para tokoh lain, seperti soekarno, Mohammad Hatta, Muhammad Yamin, Achmad Soebardjo, Abiekoesno Tjokrosoejono, Haji Agus Salim, A.A. Maramir, dan Abdul Kahar Muzakir, inilah para tokoh yang menyusun dasar Negara Indonesia, kemudian yang lebih dikenal dengan panitia Sembilan. (Zudi Setiawan: 132).

4.2. Sejarah Lahirnya Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama Riau (PWNU Riau)

Tahun 2018 yang lalu *Harlah* NU ke-92 di Masjid Agung An-Nur, Pekanbaru. Hari Lahirnya NU di Riau pada tahun 9 mei 1926. Hadirnya NU di Riau menjadi suatu kebanggaan tersendiri bagi masyarakat Riau, sebab Nahdlatul Ulama merupakan suatu wadah yang banyak menghantarkan kebaikan kepada bangsa, agama, dan negara ini. Terlebih kepada agama Islam banyak Da'i lahir dari organisasi *jami'iyah* ini. Islam di Indonesia pun secara *historical* berkembang secara pesat dari rahim Nahdlatul Ulama, rahim yang mulia. (<http://www.nu.or.id/post/read/90148/presiden-jokowi-hadiri-harlah-ke-92-nu-di-riau>)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Riau memang pada dasarnya mayoritasnya Islam. Dan Islam pula indetik dengan orang Riau, dengan orang melayu. Orang melayu adalah orang Islam. Itulah sebabnya kehadiran kepengurusan Nahdlatul Ulama di Riau menjadi cerong kebangkitan Islam di Riau baik dari segi ekonomi, politik, dan sosialnya. Riau adalah salah satu bukti bahwa kekuatan Islam itu seperti satu tubuh. Satu yang terluka maka seluruh tubuh akan merasakan sakitnya.

NU Riau kini telah berakar kuat melihat bagaimana *Harlahnya* yang ke-92 di tahun 2018 yang lalu sangat magis sekali, banyak para ulama yang notebene NU menghadiri kelahirannya, para pejabat negara ikut pula mengucapkan selamat kepada NU Riau. Maka dapatlah dikatakan NU tak dapat dipisahkan dengan Riau, dengan orang melayu, sebab ia telah berakar, akarnya telah terhunjam ke dalam tanah dan kedalamannya itu tak dapat pula diukur dengan alat apapun.

Di mana-mana kita temui, bila kita melihat orang melayu, di dalam agamanya Islam, pasti ia adalah orang NU. Sebagaimana kebiasaan orang NU adalah saungan, tahlillan, sabar dalam menyikapi berbagai perbedaan mazhab. Sikapnya lebih moderat, santun, tidak ekstrimis, eksklusif, dan intoleransi. Itulah yang menarik di organisasi ini, orang yang tertarik untuk masuk ke NU. Sebab ia lebih mengedepankan akal pikiran yang lebih islami ketimbang hawa nafsunya.

Sebagaimana K.H. Hasyim Asy'ari seorang ulama yang telah melahirkan NU ini untuk kepentingan umat, bangsa, agama, dan negara. Ia melahirkan NU ini dengan maksud supaya umat Islam itu tercerahkan, bangsa ini tercerahkan, agama ini tercerahkan, negara ini terbantuan dari segi ekonomi dan sosial, jangan hendak dibelah oleh kepentingan orang luar. Oleh sebab itu NU di Riau



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dihadirkan dengan kepentingan yang sama. Bahwa Islam dihadirkan untuk seluruh alam bukan untuk satu golongan.

Pada masa penjajahan, NU bersama dengan organisasi-organisasi kemasyarakatan Islam lainnya – seperti Serikat Dagang Islam dan Muhammadiyah – secara terbuka menentang kolonialisme. NU antara lain mengeluarkan pernyataan yang menolak kerja rodi maupun milisi.

Cikal bakal NU – yang disusun oleh K.H. Hasyim Asy'ari dan K.H. Wahab Hasbullah – memang organisasi pergerakan seperti Nahdlatul Wathan, yang artinya Kebangkitan Tanah Air Pada 1916. Itulah sebabnya NU merupakan organisasi sosial dan keagamaan, ia lebih mementingkan persoalan kebangsaan dan kemasyarakatan karena itulah yang diajarkan Islam.

(https://www.bbc.com/indonesia/laporan_khusus/2010/03/100319_kronologi)



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB VI PENUTUP

6.1 Kesimpulan

1. Semenjak NU di bawah kepemimpinan Said Aqil Siradj dan Rusli Ahmad NU kiblatnya lebih banyak kearah politik ketimbang kearah dalam membina umat, dan semenjak dibawah kepemimpinannya itu pula keberpihakan elite NU di pilpres tahun 2019 terhadap salah satu paslon terjadi. Semua itu disebabkan terdapat adanya kepentingan-kepentingan elitnya.
2. Ke-NU-an dan ke-Indonesiaan yang dahulu melekat dalam organisasi yang berbasis pesantren ini terlihat memecahkan diri, tidak ada lagi kekompakan dalam membina umat, semua itu disebabkan keberpihakan elite-elite PWNU Riau di dalam pilpres tahun 2019. Keberpihakan itu terjadi dilatarbelakangi karena elite-elitnya juga adalah seorang politisi dan pernah menjabat sebagai anggota DPRD Provinsi Riau. Sehingga NU tidak lagi dipandang sebagai organisasi keagamaan tetapi sebagai organisasi kepentingan.
3. Keberpihakan terjadi disebabkan lebih banyaknya etensitas *idealisme politik* yang sangat dibudayakan dari ketua PWNU-nya. Sehingga etensitas dalam membina umat dan berkhidmat kepada agama, berkhidmat kepada ulama, kepada habaib, kepada bangsa dan negara ini terkikis oleh



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

moderenisme dan kapitalisme. Sehingga kultur ke-NU-an yang dahulu memiliki cahaya kini telah pudar dikarenakan kultur politik lebih menyalakan ketimbang kultur agama. Kultur politik itulah yang memadamkan api yang dahulu pernah dikobarkan K.H Hasyim Asy'ari dalam membina umat.

6.2 Saran

1. Untuk PWNU Riau dalam memilih pemimpin haruslah berlatar belakang NU. Sehingga dasar-dasar ke-NU-an ia tahu dan dijalankan dengan semestinya.
2. Untuk PWNU Riau kembalilah ke jalur NU yang sesungguhnya. Kembalilah kepada *khittah* 1926. Kultur NU seperti inilah yang dapat membawa bangsa dan agama ini berkembang lebih baik.
3. Untuk PWNU Riau kembalilah sebagai organisasi pengayom umat, jangan terlibat di dalam politik praktis yang dapat merugikan NU, binalah umat ini sebagaimana yang telah pendirinya dahulu lakukan.

UIN SUSKA RIAU



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

DAFTAR PUSTAKA

Ayat Al-Qur'an :

QS. asy-Syura: 38

Buku :

Arikunto Suharsimi. 2006. *Metodologi Penelitian*. Yogyakarta: Bina Aksara.

Arikunto. Suharsimi. 2013. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Bandung: Alfabeta.

Ismail, Faisal. *Dilema NU di Tengah Badai Pragmatisme Politik*. Jakarta: Proyek Peningkatan Pengkajian Kerukunan Hidup Umat Beragama Puslitbang Kehidupan Beragama Badan Litbang Agama RI Jakarta, 2004.

Ridwan, Nur Khalik. *NU dan Bangsa 1914-2010 : Pergulatan Politik dan Kekuasaan*. Nur Khalik Ridwan-Jogjakarta: Ar-Ruzz Media, 2016.

Marijan, Kacung. *Quo Vadis NU Setelah kembali ke Khittah 1926*. Jakarta: PT Gelora Aksara Pratama, 2016.

Abbas, K. H. Siradjuddin. *I'tiqad Ahlussunnah Wal-jama'ah*. Jakarta: Pustaka Tarbiyah, 1981.

Abbas, K. H. Sirajuddin. *Sejarah dan Keagungan Madzhab Syafi'i*. Jakarta: Pustaka Tarbiyah, 1981.

Adullah, Taufiq (ed.). *Islam di Indonesia*. Jakarta: Tintamas, 1974.

Adussami, Humaidy dan Ridwan Fakla AS (edS.). *Biografi 5 Rais 'Am Nahdlatul Ulama*. Yogyakarta: LTN NU dan Pustaka Pelajar, 1995.

Soebakar, H. *Sejarah Hidup KH. A. Wahid Hasyim dan Karangan Tersiar*. Jakarta: Panitia Penulisan Buku Peringatan Almarhum KH. A. Wahid Hasyim, 1957.

Adnan, A. Basit. *Ke-NU-an*. Yogyakarta: Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama, 1981.

Arhanaf. *Kyai Hasyim Asy'ari: Bapak Umat Islam Indonesia*. Jombang: t.p., 1949.

Amam, Choirul. *Gerak Langkah Pemuda Anshor: Sebuah Percikan Sejarah Kelahiran*. Surabaya: Aula, 1990.

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarangi mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Saif Kasim Riau

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
- Alufri, H. Saleh. *Politik NU dan Era Demokratisasi Gus Dur*. Surabaya: LPLI, 1997.
- Ida, Laoda, *NU Muda Kaum Progresif dan Sekulerisme Baru*, Jakarta: Erlangga, 2004.
- Marijan, Kacung, *Quo Vadis NU setelah kembali ke Khittah 1926*, Jakarta: Erlangga, 1992.
- Mochit, Abdul Muzadi, *Mengenal Nahdlatul Ulama*, Surabaya: Kalista, 2006.
- Rouf, Abdul, *NU dan Civil Islam di Indonesia*, Jakarta: PT Intimedia Ciptan Nusantara, 2010.
- Dharwis, Ellyasa, *Gus Dur – NU – dan Masyarakat Sipil*, Yogyakarta: LKIS, 2018.
- Dhofier, Zamkhasary, *Tradisi Pesantren: studi tentang pandangan hidup kyai*, Jakarta: LP3ES, 1982.
- Hamim, Thoha, *Islam dan NU di bawah tekanan Problematika Kontemporer*, Surabaya: Diantama, 2004.
- Ignas, Kleden, dkk. 2000. *Pergulatan Pesantren 7 Demokratisasi*. Yogyakarta: LkiS.
- Mahendra, Yusril Ihza. 1999. *Modernisme dan Fundamenalisme dalam Politik Islam*. Jakarta: Paramadina
- Marsh, Gerry Stocker. 2010. *Teori dan Metode dalam Ilmu Politik*. Bandung: Nusa Media.
- Moesa, Ali Maschan. 2002. *NU, Agama & Demokrasi*. Surabaya: Pustaka Dai Muda.
- Purwanto, Wawan. 2010. *Nahdlatul Ulama Menembus Batas Negara Dan Peradaban*. Jakarta: CMB Press.
- Poma, Margaret M. 1992. *Sosiologi Kontemporer*. Jakarta: CV Rajawali.
- Rouf, Maswadi. 2001. *Konsensus dan Konflik Politik*. Jakarta: Direktorat Jendral Pendidikan Tinggi Departemen Pendidikan Nasional.
- Sribakti, Ramlan. 1992. *Memahami Ilmu Politik*. Jakarta: PT. Gramedia Widiasarana Indonesia.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dianggap mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- Had, *Teologi Humanistik :Kajian tentang Wacana Islam Pembebas di Kalangan Pemikir Muslim Indonesia Masa Orde Baru*, Surabaya: Tesis PPs Sunan Ampel, 2001.
- Buinessen, Martin Van , *NU :Tradisi, Relasi-relasi Kuasa,Pencarian Wacana Baru*, Yogyakarta : LKiS,1995.
- Dhakidae, Dhaniel, “Langkah Non-Politik dari Politik Nahdlatul Ulama”, dalam Ellayasa KH. Dharwis (ed), *Gus Dur, NU dan Masyarakat Sipil*, Yogyakarta: LKiS, 1997.
- Dhofier, Zamakhsyari, *Tradisi Pesantren: Studi tentang Pandangan Hidup Kiai*, Jakarta: LP3ES, 1983.
- Fillard, Andree, *NU Vis a Vis Negara: Pencarian Isi, Bentuk dan Makna*, Yogyakarta: LKiS, 1999.
- Falaakh, Mohammad Fajrul, “NU dan Cita-Cita Masyarakat madani”, *Pikiran Rakyat*, 1 Februari 1996.
- Asghar, Ali Enginer. *Islam dan Teologi Pembebasan*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1999. Anwar. D. F. *Militer dan Polilik di Indonesia: Sebuah T'injaun* (Jakarta: Masyarakat Indonesia, 1983).
- Batton, Greg. *Abdurrahman Wahid, Muslim Democrat, Indonesian President*. Sydney: UNSW, 2002.
- Buinessen, Martin Van. “Konjungtur Sosial Politik di Jagad NU Paska Khittah 26.” *In Gus Dur dan Masyarakat Sipil*. Yogyakarta: LKiS, 1999.
- Buinessen, Martin van. *NU Tradisi Relasi Kuasa, pencarian Wacana Baru*. Yogyakarta: LKiS, 1999.
- Dhofri, Saleh Al. “Hentikan Karantina Politik Bagi NU.” *In NU Khittah dan Godaan Politik, by Sinansari Ecip*. Bandung: Mizan, 1994.
- Dissel, Enrique. “a History of the Church in Latin America.” *In Selected Reading on Liberation Theology, by Kenneth R. Hall*, 29. Yogyakarta: CRCS, 2003.
- Fealey, Greg. *Ijtihad Potitik Ulama NU, 1952-1967*. Yogyakarta: LKiS, 1998.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Kimball, Charles. *Kala Agama Jadi Bencana*. Bandung: Mizan, 2003.

Marijan, Kacung. *Quo Vadis NU Setelah Kembali ke Khittah 1926*. Jakarta: Erlangga, 1992.

Michael Amalados. *Michael Amalados, Teologi Pembebasan*. Yogyakarta: Insist Press, 2001.

Mody, Nawaz. *B. Indonesia under Suharto*. Bangalore: Sterling, 1987.

Nakamura, Mitsuo. *Agama dan Perubahan Politik di Indonesia: Tradisionalisme Radikal*. Surakarta: Hapsara, 1982.

Website:

<https://pekanbaru.tribunnews.com/2019/02/19/25-juta-warga-nu-di-riau-siap-menangkan-jokowi-maruf> diakses jam 13.23 wib.

<http://www.nu.or.id/post/read/90148/presiden-jokowi-hadiri-harlah-ke-92-nu-di-riau> diakses jam 11.30 wib.

https://www.bbc.com/indonesia/laporan_khusus/2010/03/100319_kronologi diakses jam 11.35 wib wib

Jurnal:

Masyhuri Muhammad (2016) NU dan Paradigma Teologi Politik Pembebasan: Refleksi Hitoris pasca *Khittah*. *Jurnal Ilmiah Agama Islam*, Vol 1.

Firdaus Muhammad (2015) Dinamika Pemikiran dan Gerakan Politik Nahdlatul Ulama. *Jurnal Studi Agama dan Pemikiran agama Islam*, Vol 9.

Hartati dan Hambali (2018). Transformasi NU di Indonesia : Upaya Menghilangkan Polemik di tengah Perubahan Politik. *Jurnal Islam Negeri Ar-Raniry*, Vol 20.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Lampiran. 1

1. Motif

DAFTAR DRAF PERTANYAAN WAWANCARA

1. Bagaimana menurut bapak ketika bapak melihat fenomena yang terjadi di dalam tubuh PWNU Riau sekarang, yang dijadikan alat politik oleh sebahagian elitnya untuk tujuan tertentu di pilpres 2019, sehingga politik pragmatis sering terjadi di tubuh organisasi mulia ini. Jika dilihat secara *historical* semua yang terjadi di tahun 2019 sangat bertolak belakang dengan *Khittah NU 1926* yang menyatakan bahwa dirinya bukan orsospol, dan tidak ada kaitannya sama sekali dengan orsospol, tetapi NU adalah organisasi keagamaan. Apakah politik pragmatis itu bermuatan “politik kebangsaan” atau sebaliknya, yakni “politik kepentingan”?
2. Apakah sikap akomodatif yang dilakukan elite PWNU Riau terhadap pilpres tahun 2019 yang lalu itu sikap akomodatif *politis* yang menunjukkan keberpihakan terhadap salah satu paslon atau sebaliknya?
3. Sikap Kritis PWNU Riau terhadap “kontestasi politik 2019” terhadap peristiwa gerakan #2019Ganti Presiden dan gerakan #Jokowi2Periode. Apakah itu sikap kritis yang “keberpihakan” terhadap salah satu paslon atau sikap kritis demi kepentingan kebangsaan saja?



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Tindakan

1. Apakah di dalam tubuh PWNU Riau terdapat adanya prosedur “rekomendasi penentuan calon”? Bagaimanakah bentuk prosedur prosedur “rekomendasi penentuan calon” tersebut? Apakah “rekomendasi penentuan calon” itu menunjukkan “kebrpihakan” terhadap salah satu paslon? Lalu apa langkah PWNU Riau terhadap semua itu untuk menjaga kesucian *Khittah 1926* di dalam pusaran pilpres tahun 2019 jika memang benar adanya?
2. Maraknya deklarasi elite PWNU Riau terhadap paslon tertentu telah menjadi sorotan publik. Kontestasi politik semakin bergejolak banyak yang berkata: NU telah dijadikan alat politik. Apa tindakan NU terhadap deklrasi yang dilakukan elite NU tersebut?
3. Keberadaan Nahdlatul di Provinsi Riau tentunya mempengaruhi peta dukungan politik di pilpres. Ada 2,5 juta warga nahdiyin yang sangat menentukan dan mempengaruhi peta kontestasi politik 2019. Beredar diberbagai media kredibel bahwa elite PWNU Riau telah memobilisasi NU untuk mendukung salah satu paslon. Bagaimanakah mobilisasi itu bisa terjadi? Apa tindakan NU terhadap mobilisasi massa tersebut?

UIN SUSKA RIAU

DOKUMENTASI PENELITIAN WAWANCARA BERSAMA ELITE PWNU RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarangi mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Keterangan: wawancara bersama K.H. Hajar Hasan Rais Syuriah PWNU Riau



Keterangan: wawancara bersama Rifqi Pahlevi sekretaris LPNU Riau

© Hak cipta milik UIN Suska Riau



Keterangan: wawancara bersama Nurhadi, SE, MM akademisi (elite NU non struktural)



Keterangan: wawancara bersama Ustadz Suhudi, S.Pd (Tokoh NU non struktural)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau



Keterangan: wawancara bersama Bapak Tribowo simpatisan NU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DOKUMENTASI PENELITIAN WAWANCARA BERSAMA PARA RESPONDEN

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Keterangan: wawancara bersama Bapak Beni Anwar (guru SMAN 1 GAUNG)



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Keterangan: wawancara bersama Bapak Hasan Basri (pedagang)



Keterangan: wawancara bersama Bapak Saprima Jaya (guru mengaji)



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
FAKULTAS EKONOMI DAN ILMU SOSIAL
كلية العلوم الاقتصادية و الاجتماعية
FACULTY OF ECONOMICS AND SOCIAL SCIENCES

H. R. Soehrantas No. 155 Km. 15 Tuahmadani Tampan - Pekanbaru 28293 PO Box 1400 Telp. 0761-562051
Fax. 0761-562052 Web: www.uin-suska.ac.id, E-mail : fekonos@uin-suska.ac.id

Un.04/E.VII/PP.00.9/7378/2019
Biasa

Pekanbaru, 5 Desember 2019 M
8 Rabiul Akhir 1441

Bimbingan Skripsi

Kepada
Yth. Mashuri, MA
Dosen Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial
UIN Sultan Syarif Kasim Riau
Pekanbaru

Assalamu'alaikum Wr. Wb.
Dengan hormat,
Bersama ini kami sampaikan kepada Saudara bahwa

N a m a	: Apriyawan
NIM	: 11675102528
Jurusan	: Administrasi Negara
Semester	: VII (Tujuh)

adalah Mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau yang telah memenuhi syarat untuk menyelesaikan studi/ menyusun skripsi dengan judul "Politik Elite NU; Keorpihakan dalam Pilpres Tahun 2019". Sehubungan dengan itu kami menunjuk Saudarasebagai pembimbingdalam menyelesaikan skripsi mahasiswa tersebut di atas.

Demikian disampaikan, atas bantuan Saudara diucapkan terima kasih.



Dr. Drs. H. Muli, Said HM, M.Ag, MM
NIP. 19620512 198903 1 003

UIN SUSKA RIAU

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
FAKULTAS EKONOMI DAN ILMU SOSIAL
كلية العلوم الاقتصادية والاجتماعية
FACULTY OF ECONOMICS AND SOCIAL SCIENCES**

Jl. H. R. Soebrantas No. 155 Km. 15 Tuahmadani Tampan - Pekanbaru 28293 PO Box 1400 Telp. 0761-562051
Fax. 0761-562052 Web. www.uin-suska.ac.id, E-mail : fekonsos@uin-suska.ac.id

Un.04/F.VII/PP.00.9/1070/2020

Biasa

Izin Riset

Pekanbaru, 17 Februari 2020 M
22 Jumadil Akhir 1441 H

Kepada
Yth. Pimpinan
Wilayah Nahdlatul Ulama (PWNU) Riau
di Tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Dengan hormat, disampaikan bahwa salah seorang Mahasiswa Fakultas
Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau :

Nama : Apriyawan
NIM. : 11675102528
Jurusan : Administrasi Negara
Semester : VIII (Delapan)

bermaksud mengadakan Riset dalam rangka penulisan skripsi yang berjudul:
"Politik Elite NU; Keberpihakan dalam Pilpres Tahun 2019" Untuk itu kami
mohon kiranya Saudara berkenan memberikan bantuan yang diperlukan kepada
mahasiswa tersebut.

Demikianlah, atas bantuan dan kerjasama Saudara diucapkan terima kasih.

Dekan,



Dr. Drs. H. Muh. Said HM, M.Ag, MM

NIP. 19620512 198903 1 003

1. Diararar mengutip abagarar atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diararar mengumumkan dan memperbararar abagarar atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



PENGURUS WILAYAH NAHDLATUL ULAMA PROVINSI RIAU

Sekretariat : Jl. Diponegoro IX No. 09 Kel. Sukamulya Kec. Sail Kota Pekanbaru-Riau kode Pos. 28113
Telp. (0761) 8410851 / (0761) 8441584 Email: pwnuriau@gmail.com

Pekanbaru, 25 Jumaadil-Akhir 1441 H

19 Februari 2020 M

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

Kepada Yth;
Ketua Jurusan Administrasi Negara

Tempat

Assalâmu `alaikum Warahmatullâh Wabarakâtuh.

Dengan Hormat

Salam beriring doa semoga Allah *Subhânahu Wata`âlâ* senantiasa memberikan pertolongan dan perlindungan kepada Bapak dalam melaksanakan tugas sehari-hari, Âmin.

Sehubungan dengan surat dari Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, Nomor : Un.04/F.VII/PP.00.9/1070/2020, Hal: Izin mengadakan penelitian. Dengan ini menerangkan nama mahasiswa di bawah ini :

Nama	: Apriyawan
Jenis Kelamin	: Laki-Laki
NIM	: 11675102528
Jurusan	: Administrasi Negara
Semester	: VIII (Delapan)

Peneliti telah mengadakan Penelitian di Wilayah Nahdlatul Ulama (PWNU) Riau dan telah melengkapi data pada penyusunan skripsi dengan permasalahan dan judul : "Politik Elite NU: Keberpihakan dalam pilpres Tahun 2019".

Demikianlah surat balasan ini kami sampaikan, atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

والله الموفق إلى أقوم الطريق
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته

PENGURUS WILAYAH NAHDLATUL ULAMA (PWNU)
PROVINSI RIAU

Dr. H. Hajar Hasbi, MA

Rais Syuriah

Tersusun Kepada Yth;

1. Arsip

DR. KH. Muhammad Syaifuddin, M.Ag

Katib

T. Rusli Ahmad, SE

Ketua Tanfidz

Prof. Dr. H. Ashaluddin Jalil, M.S

Sekretaris

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



BIOGRAFI PENULIS

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Penulis bernama APRIYAWAN lahir pada tanggal 5 November 1997 di Desa Lahang Baru, penulis merupakan anak yang ke 6 dari 6 bersaudara dari ayahanda yang bernama Alun dan Ibunda bernama Hasrah.

Penulis memulai pendidikan formal Sekolah Dasar pada SDN 007

Lahang Baru, Kemudian penulis melanjutkan ke Sekolah Menengah Pertama atau SMPN 1

GAUNG Kuala Lahang, kemudian penulis melanjutkan Sekolah Menengah Atas atau SMAN 1

GAUNG Kuala Lahang. Setelah menyelesaikan di SMAN 1 GAUNG kemudian penulis menjadi

salah satu Mahasiswa di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau Pekanbaru pada

tahun 2016. Penulis mengambil Jurusan Administrasi Negara pada Fakultas Ekonomi dan Ilmu

Sosial.

Penulis melakukan penelitian di PWNU Riau dan akhirnya penulis pada tanggal 16 Juni

2020 penulis di *Munaqasohkan* dalam sidang ujian Sarjana (S1) Jurusan Administrasi Negara

pada Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial UIN SUSKA RIAU dan penulis dinyatakan lulus

dengan predikat sangat memuaskan sehingga memperoleh gelar Sarjana Sosial (S.Sos)

UIN SUSKA RIAU